

KPK CIDUK WALI KOTA MADIUN

JAKARTA, BN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 15 orang, termasuk Wali Kota Madiun Maidi, dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Madiun, Jawa Timur, Senin (19/1/2026). Hal itu dibenarkan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi wartawan.

"Benar, hari ini Senin (19/1/2026), tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup, dengan mengamankan sejumlah 15 orang, di wilayah Madiun, Jawa Timur," ujar Budi Prasetyo, Senin (19/1/2026).

"Selain itu tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah," ujar dia melanjutkan. Budi

■ Bersambung ke hal.11 kol.1



Wali Kota Madiun Maidi. (ist)

DPRD Gelar Rapat Paripurna, Agenda Peringatan Kabupaten OKU Timur Ke-22

□ “Melangkah Bersama, Maju Lebih Cepat Dalam Bingkai Kemuliaan”



Berbagai momen rangkaian kegiatan DPRD OKU Timur dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-22 Kabupaten OKU Timur. Tampak Ketua DPRD Kabupaten OKU Timur Hermanto, S.E., M.M. memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna ke-16. Acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan ramah tamah dengan para tamu dan undangan. Acara berlangsung sederhana, khidmat, sebagai tanda empati atas musibah banjir yang melanda OKU Timur dan daerah lainnya. (ist)

OKU TIMUR, BN - DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur menggelar rapat paripurna ke 16 dengan agenda memperingati Hari Jadi ke-22 Kabupaten OKU Timur, Senin 19 Januari 2026. Peringatan kali ini mengusung tema, "Melangkah Bersama, Maju Lebih Cepat Dalam Bingkai Kemuliaan". Rapat dibuka secara langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten OKU Timur Hermanto, S.E., M.M.

P E R I N G A T A N tahun ini berlangsung dengan suasana sederhana, reflektif, menyusul bencana banjir yang baru saja melanda sejumlah wilayah di OKU Timur pada awal Januari lalu.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-22 kepada Kabupaten OKU Timur. Ia mengapresiasi berbagai capaian dan prestasi yang telah diraih, yang menujukkan bahwa OKU Timur mampu menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap daerahnya.

Gubernur menegaskan, bahwa capaian tersebut harus menjadi pemacu untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan. Memasuki tahun 2026, ia meminta agar seluruh infrastruktur yang belum selesai dapat segera dituntaskan, serta infrastruktur yang mengalami kerusakan segera direhabilitasi.

Secara khusus, Guber-

nur menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan produktivitas masyarakat, seperti jalan dan jembatan penghubung, agar aktivitas ekonomi, pertanian, dan distribusi hasil produksi warga dapat berjalan lebih lancar dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat OKU Timur.

Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin, M.T., M.M. mengakui bahwa peringatan hari jadi bukan hanya momentum mengenang perjalanan daerah, tetapi juga saat yang tepat untuk meneguhkan kepedulian

dikade, Kabupaten OKU Timur terus menunjukkan kemajuan di berbagai sektor, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, hingga berbagai penghargaan tingkat nasional. Meski demikian, Bupati menekankan bahwa capaian tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari proses panjang

untuk menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Pada kesempatan itu, Bupati juga secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila dalam perjalanan pembangunan masih terdapat kekurangan. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan serta menjawab ke-

butuhan masyarakat secara lebih responsif.

Perhatian khusus disampaikan terhadap banjir akibat luapan Sungai Muara Balak, Sungai Macak, dan Sungai Rengas yang terjadi pada 8 Januari 2026.

Bencana tersebut mengakibatkan ribuan rumah warga tergenang, lahan pertanian terdampak, serta kerusakan pada infrastruktur dan fasilitas umum.

Momentum hari jadi ini hendaknya menjadi pengingat bahwa kekuatan kita ada pada kebersamaan. Bukan sekadar empati dalam kata-kata, tetapi gotong royong dan langkah nyata untuk membantu pemuliharaan ekonomi dan kehidupan masyarakat pascabanjir," tegasnya.

Bupati mengajak seluruh elemen, mulai dari jajaran pemerintah, DPRD, dunia usaha, hingga masyarakat luas untuk memperkuat solidaritas agar proses pemuliharaan dapat

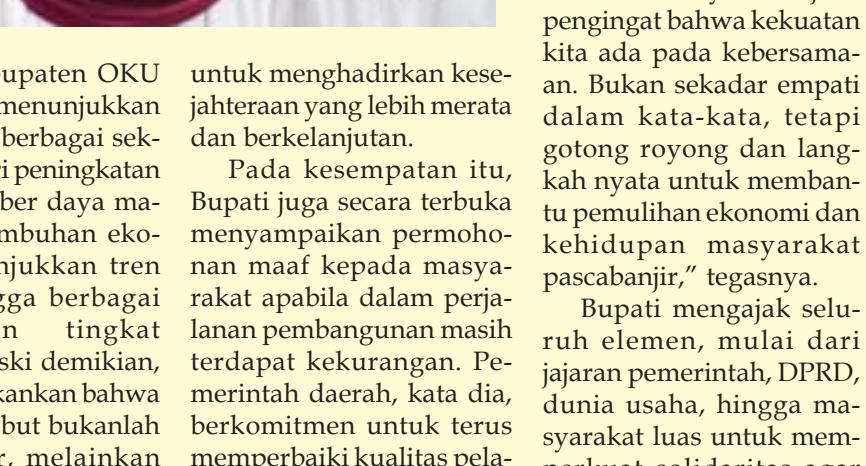
berjalan lebih cepat dan OKU Timur mampu bangkit kembali dengan lebih kuat.

Pada momen Rapat Paripurna tersebut, juga dilakukan penandatanganan prasasti peresmian sejumlah jembatan oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru. Infrastruktur yang diresmikan meliputi Jembatan Gantung Negeri Sakti Kecamatan Cempaka, Jembatan Jatimulya II Kecamatan Madang Suku II, serta Jembatan Desa Persiapan Sukajaya-Sukamaju Kecamatan Buay Madang Timur.

Keberadaan jembatan ini diharapkan dapat memperkuat koneksi antarwilayah, memperlancar mobilitas warga, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-22 Kabupaten OKU Timur, acara juga ditandai dengan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus refleksi atas perjalanan pembangunan daerah, dengan harapan OKU Timur terus tumbuh sebagai daerah yang tangguh dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat.

(Nelis Sri Wahyuni/Adv)



4 Mantan Bupati Sidoarjo Beri Kesaksian di PN Tipikor



Proses persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya. (Teddy Syah)

SIDOARJO, BN - Perkara korupsi pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, mulai terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sidang tersebut digelar di PN Tipikor Surabaya dan menjerat empat mantan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Kabupaten Sidoarjo sebagai terdakwa.

Dalam persidangan, Pe-nuntut Umum menghadirkan sejumlah saksi kunci untuk dimintai keterangan. Di antaranya mantan Bupati Sidoarjo Win Hendarso, periode 2000-2010. Mantan Bupati Saiful Ilah, Periode 2010-2015 dan 2016-2021. Pj Bupati 2020, Hudiyono. Serta Mantan Bupati periode 2021-2024, Gus Muhdior. Di hadapan majelis hakim, Win Hendarso memegaskan bahwa Rusunawa Tambaksawah merupakan barang milik daerah yang berasal dari hibah pemerintah pusat.

Menurut Win, karena berasal dari hibah, rusunawa tersebut harus segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Sidoarjo. Hal itu tetap dilakukan meski proses administrasi aset belum sepenuhnya rampung. "Rusunawa Tambaksawah itu hibah dari pemerintah pusat. Karena hibah, harus segera dimanfaatkan untuk masyarakat," ujar Win.

Win yang menjabat Bupati Sidoarjo periode 2005-2010 itu menjelaskan, perjanjian kerja sama (PKS) pengelolaan Rusunawa Tambaksawah telah ditandatangani sejak 2006.

PKS tersebut kemudian diperbarui pada tahun 2010. Ia menegaskan, saat PKS itu berjalan, Sulaksono yang kini menjadi salah satu terdakwa belum menjabat sebagai Kepala Dinas Perkim CKTR. "PKS itu sudah ada sejak 2006 dan diperbarui 2010. Waktu itu Sulaksono belum menjabat sebagai kadis," jelasnya.

Presiden Prabowo Resmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang

MALANG, BN - Gubernur Khofifah Indar Parawansa mendampingi kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang di Desa Gampangan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang pada Selasa, (13/1). SMA Taruna Nusantara Kampus Malang ini memiliki lahan 30 hektare (Ha) yang dibangun saat Bapak Prabowo menjabat Menteri Pertahanan.

SMA Taruna Nusantara dirancang dengan fasilitas modern untuk menunjang seluruh aspek kehidupan siswa (Taruna), yakni gedung pendidikan dilengkapi teknologi pembelajaran terkini, asrama ksatrian yang nyaman dan fasilitas olahraga.

Selain itu, pusat layanan siswa atau Taruna Nusantara Center seperti Advance Study Center (ASC) dan English Study Center (ESC). Gubernur Khofifah mengatakan kehadiran SMA Taruna Nusantara mendukung program peningkatan kualitas pendidikan di sekolah berasrama unggulan untuk membentuk pemimpin berkarakter dan berwawasan kebangsaan.

"Pentingnya sekolah taruna dalam membangun karakter dan prestasi akademik siswa, serta mendorong taruna untuk menjadi generasi unggul, garda terdepan penjaga NKRI," ungkapnya.

Menurut Khofifah, SMA Taruna Nusantara menawarkan lingkungan belajar yang asri dan representatif untuk mendukung kegiatan akademik serta pembinaan karakter siswa.

Melalui Kurikulum terintegrasi, sistem pendidikan tidak fokus pada kecerdasan akademik (Kurikulum Nasional), tetapi juga penguatan karakter melalui Kurikulum Khusus yang meliputi wawasan kebangsaan, kepemimpinan dan kemandirian. "Pembinaan karakter dan akademik diberikan



Presiden Prabowo saat meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang. (ist)

dan tidak bisa dipisahkan dalam sistem pendidikan di SMA Taruna Nusantara. Pola sistem pembinaan pendidikan mengutamakan pembentukan karakter bagi para siswa, beriringan dengan peningkatan prestasi akademik, menjadi satu bagian yang utuh," ungkapnya.

Lebih lanjut, Khofifah mengatakan SMA Taruna Nusantara menjadi wadah siswa untuk terus bertumbuh, belajar dan berkarya

sehingga meningkatkan kompetensi dan skill mereka yang akan menjadi pemimpin di Indonesia Emas 2045.

"Mudah-mudahan semua peserta didik dapat mengembangkan mandat menjadi pemimpin masa depan. Insya Allah saat Indonesia Emas 2045, pemimpin emasnya dari siswa-swi Jawa Timur," ungkapnya.

Khofifah berpesan kepada seluruh siswa-siswi untuk terus menjaga prestasi, menjaga kemampuan yang sudah dimiliki agar terus dikembangkan guna meraih prestasi setinggi-tingginya. "Teruslah meraih prestasi, berikan dedikasi terbaik bagi bangsa dan negara. Negeri ini tidak hanya butuh generasi pintar, tapi generasi pintar dan benar," ungkapnya.

Setelah meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Gubernur Khofifah bersama Presiden Prabowo meninjau sarana prasarana. Dilanjutkan foto bersama siswa-siswi SMA Taruna Nusantara Kampus Malang.

Di sisi lain, dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan, pendidikan dan kesehatan adalah instrumen pembangunan, kesejahteraan, demokrasi, pendidikan dan menghilangkan kemiskinan.

"Saya bangga hari ini melihat hasil kita dan dengan mengucap bismillah siang ini saya Prabowo Subianto meresmikan SMA Taruna Nusantara kampus malang," ungkapnya. (dji)

Kades Drancang Titip Aspirasi Bedah Rumah untuk Warga Kurang Mampu



Rumah yang dihuni Pak Umbar saat ini dalam kondisi tidak layak huni. (Subhan Arif)

GRESIK, BN - Sabtu (03/01/2026), Kepala Desa Drancang, M. Nastain, terlihat sedang mengamati dengan seksama proses pembangunan di depan pintu gerbang Unit Pelaksana Teknis (UPT) SD Negeri 219 Gresik. Kehadiran sosok kades yang dikenal dekat dengan awak media ini ti-

dak hanya untuk memantau perkembangan infrastruktur di wilayahnya, namun juga membawa misi kemanusiaan.

Dalam kesempatan tersebut, M. Nastain menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi salah satu warga bernama Pak Umbar. Meskipun secara administrasi

tersebut bocor parah hingga tidak dapat ditempati untuk berteduh.

M. Nastain berharap peran media dapat membantu memfasilitasi aspirasi ini agar sampai kepada pihak terkait atau instansi yang berkompeten. Hal ini diharapkan dapat memicu respons cepat dari pemerintah daerah maupun dinas sosial guna memberikan hunian yang lebih layak bagi Pak Umbar.

"Kami sangat berharap Pak Umbar bisa mendapatkan bantuan bedah rumah dari program pemerintah, apapun namanya. Kondisinya memang layak mendapatkan perhatian," ujar M. Nastain di hadapan awak media.

Berdasarkan informasi

yang dihimpun dari berbagai sumber di lapangan,

rumah yang dihuni Pak Umbar saat ini dalam kondisi tidak layak huni. Ironisnya,

jika hujan turun, rumah

tersebut bocor parah hingga tidak dapat ditempati untuk berteduh.

M. Nastain berharap peran media dapat membantu memfasilitasi aspirasi ini agar sampai kepada pihak terkait atau instansi yang berkompeten. Hal ini diharapkan dapat memicu respons cepat dari pemerintah daerah maupun dinas sosial guna memberikan hunian yang lebih layak bagi Pak Umbar.

"Kami sangat berharap Pak Umbar bisa mendapatkan bantuan bedah rumah dari program pemerintah, apapun namanya. Kondisinya memang layak mendapatkan perhatian," ujar M. Nastain di hadapan awak media.

Berdasarkan informasi

yang dihimpun dari berbagai sumber di lapangan,

rumah yang dihuni Pak Umbar saat ini dalam kondisi tidak layak huni. Ironisnya,

jika hujan turun, rumah

tersebut bocor parah hingga tidak dapat ditempati untuk berteduh.

"Kami sangat berharap Pak Umbar bisa mendapatkan bantuan bedah rumah dari program pemerintah, apapun namanya. Kondisinya memang layak mendapatkan perhatian," ujar M. Nastain di hadapan awak media.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber di lapangan, rumah yang dihuni Pak Umbar saat ini dalam kondisi tidak layak huni. Ironisnya, jika hujan turun, rumah

tersebut bocor parah hingga tidak dapat ditempati untuk berteduh.

"Kami sangat berharap Pak Umbar bisa mendapatkan bantuan bedah rumah dari program pemerintah, apapun namanya. Kondisinya memang layak mendapatkan perhatian," ujar M. Nastain di hadapan awak media.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber di lapangan, rumah yang dihuni Pak Umbar saat ini dalam kondisi tidak layak huni. Ironisnya, jika hujan turun, rumah

tersebut bocor parah hingga tidak dapat ditempati untuk berteduh.

"Alhamdulillah, pembangunan jalan aspal AC/WC sudah rampung dikerjakan dengan baik. Memang kemarin ada sedikit kendala (hasil) kurang bagus dikarenakan saat pengiriman turun hujan deras. Namun, kini semuanya sudah diperbaiki dan diselesaikan sesuai harapan masyarakat Semawot," ungkap Mujianto.

Dengan selesainya pembangunan infrastruktur jalan ini, diharapkan dapat mendongkrak roda perekonomian warga Desa Semawot serta memperlancar akses transportasi antar wilayah di Kecamatan Sukosewu.

Pembangunan jalan jenis AC/WC tersebut membelang sepanjang 407 meter dengan lebar 4 meter. Proyek ini menelan anggaran sebesar Rp846.305.708 (Delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus delapan rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025.

Pembangunan ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat setempat. Dar, salah satu warga Desa Semawot, mengungkapkan rasa syukurnya atas perbaikan jalan tersebut. Menurutnya, akses jalan yang mulus sangat membantu warga dalam beraktivitas sehari-hari.

"Kami sangat senang dengan dibangunnya jalan

Kelurahan Kedundung Gelar Musrenbang, Yayasan Urun Rembuk



Kelurahan Kedundung gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan tahun 2027, Senin (19/1/2026).

KOTA MOJOKERTO,

BN - Dalam rangka persiapan pembangunan jangka panjang Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan tahun 2027. Kelurahan Kedundung kecamatan Magersari Kota Mojokerto menjadi salah satu wilayah

yang pertama melaksanakan agenda tersebut sebagai forum penjaringan aspirasi masyarakat, Senin (19/1/2026).

Wali Kota Mojokerto Hj. Ika Puspitasari SE, membuka langsung Musrenbang di Kelurahan Kedundung dan sekaligus menegaskan pentingnya peran aktif warga dalam menentukan arah pembangunan.

Menurut Ning yang merupakan walikota Mojokerto perempuan pertama di kota Mojokerto tersebut menyatakan bahwa musrenbang merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan riil di lingkungan masing-masing.

"Musrenbang ini adalah media partisipasi masyarakat. Pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan yang tepat sasaran, dan itu hanya bisa dilakukan jika masyarakat menyampaikan kebutuhannya secara langsung," kata Ning Ita, sapaan akrab wali kota.

Dalam forum tersebut Ning Ita menjelaskan, seluruh usulan pembangunan tahun 2027 harus mengacu pada tema pembangunan Kota Mojokerto, yakni peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial budaya melalui daya saing unggulan daerah. Tema tersebut ditetapkan agar arah kebijakan pembangunan di seluruh kota selaras dengan visi pembangunan jangka menengah daerah.

Ia memaparkan, terdapat tiga fokus utama dalam tema pembangunan tersebut, yakni pengembangan ketahanan ekonomi, penguatan sosial budaya, serta peningkatan daya saing sektor unggulan. Hal ini dinilai penting di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global yang turut berdampak pada perekonomian nasional.

Selain ekonomi, penguatan sosial budaya juga menjadi perhatian. Nilai gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas sosial dinilai sebagai modal utama masyarakat Kota Mojokerto untuk bertahan dan berkembang dalam berbagai situasi.

Lebih lanjut, Ning Ita menyebutkan tiga sektor unggulan Kota Mojokerto yang perlu terus diperkuat, yakni sektor industri kecil menengah (IKM) seperti alas kaki, sektor industri kreatif, serta sektor jasa dan pariwisata berbasis sejarah dan budaya.

Ia menekankan, usulan yang disampaikan masyarakat harus disusun secara prioritas dan realistik, menyesuaikan dengan sembilan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan serta kemampuan anggaran kelurahan. "Pilih usulan yang paling dibutuhkan dan paling prioritas bagi masyarakat. Jangan hanya banyak, tetapi harus bisa direalisasikan," katanya.

Menutup sambutannya, Ning Ita berharap Musrenbang benar-benar dimanfaatkan sebagai ruang dialog antara pemerintah dan warga. Dengan partisipasi aktif masyarakat, ia optimis pembangunan Kota Mojokerto dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, "Silahkan sampaikan kebutuhan masing-masing lingkungan, dan harus pada prioritas pembangunan tahun 2027," tandasnya.

Di tempat terpisah, Mohammad Mostafa yang akrab cak Tofa selaku sekretaris Yayasan Penyejuk Jiwa Mojokerto yang berada di lingkungan Balongrawe Kedundung, urun rembuk sebagai bentuk keprihatinan dan kedulian pembangunan, karena sebagian warga Balongrawe belum bisa berkontribusi melalui pajak bumi.

"Kami sangat berharap surat kami segera diakomodir, direspon dan ada lanjutnya, surat pengajuan kami," harap cak Tofa. Hadir dalam kegiatan itu Camat Magersari, Setyo Budi Utomo kepada kelurahan Kedundung, DR, Aan Puji Kistanto, SH, MH dan beberapa tokoh mulai RT dan RW. (Husnan)

Peringati Isra' Mi'raj, Pemdes Pancur Hadirkan KH Ali Mahsun dalam Pengajian Umum



Kepala Desa Pancur, H. Lulus Pujiono saat memberikan sambutan di acara pengajian umum di pendopo Balai Desa Pancur. (pri)

BOJONEGORO, BN - Pemerintah Desa Pancur, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, menggelar peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Acara pengajian umum ini dilaksanakan di pendopo Balai Desa Pancur pada Minggu, 18 Januari 2026, dan dihadiri secara antusias oleh ratusan warga setempat. Acara diawali dengan pembacaan khotmil khotmil Qur'an dilanjutkan dengan sambutan Kepala Desa Pancur, H. Lulus Pujiono.

Dalam sambutannya, Lulus Pujiono mengajak seluruh hadirin untuk menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz KH Ali Mahsun dengan sebaik-baiknya. Ia menekankan pentingnya mendengarkan ceramah tersebut untuk menambah bekal dalam kehidupan sehari-hari dan meneladani sikap serta perbuatan mulia Nabi Besar Muhammad SAW.

"Apa yang disampaikan Ustadz Ali Mahsun mari kita dengarkan tausiyahnya dengan baik, untuk menambah bekal dalam kehidupan sehari-hari, dan meneladani sikap serta perbuatan mulia, seperti Nabi besar Muhammad SAW," ujarnya.

Pengajian umum ini tampak luar biasa dengan antusiasme tinggi dari masyarakat Desa Pancur yang mendengarkan dengan khidmat.

Turut hadir dalam acara tersebut tokoh agama setempat, Kiyai Roqif, yang dikenal sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Muksin di Desa Pancur. Acara ini terselenggara berkat dukungan penuh dari para tokoh agama, ulama, dan umarok (pemerintah), sebagai upaya bersama untuk mewujudkan masyarakat yang agamis di Desa Pancur. (pri)

Kades Sukendah Tekankan Berbaur Dengan Masyarakat Guna Serap Aspirasi

GRESIK, BN - Kepala Desa (Kades) Sukendah dari Mojosarirojo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menekankan pentingnya berbaur dengan masyarakat guna menyerap aspirasi dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Dalam bincang ringan di ruang kerjanya, Selasa (6/1/2026), Kades Sukendah menyatakan bahwa prioritas utamanya adalah meningkatkan kinerja tim dengan pelayanan prima dan maksimal sesuai kebutuhan publik atau warga penduduk desa, terutama dalam bidang administratif.

"Dengan berbaur ketengah-tengah masyarakat melalui berbagai macam program kegiatan, kita dapat menyerap aspirasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat," kata Kades Sukendah.

Kades Sukendah juga menegaskan bahwa ideologi yang dipegangnya dalam penyelegeraan tata kelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan/atau bernegara adalah Bhineka Tunggal Ika, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan UUD'45. "Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari," tutup Kades Sukendah. (Subhan Arif)



Kepala Desa Sukendah. (Subhan Arif)

Diskominfo Pamekasan Gelar Kegiatan Rencana Anggaran Kemitraan Dengan Media Tahun 2026

PAMEKASAN, BN - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kabupaten Pamekasan menggelar kegiatan Rencana Pelaksanaan Anggaran (RPA) sekaligus menjalin kemitraan dengan media pada tahun 2026 yang berlangsung di ruang TIK Diskominfo kabupaten Pamekasan, Senin (12/1/2026).

Dalam sambutannya kepala Diskominfo Pamekasan Muttaqin, S.Sos, Msi melalui Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Arif Rachmansyah S.STP, Msi menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan anggaran Diskominfo tahun 2026 dengan program strategis pemerintah daerah, sekaligus memperkuat sinergitas dan kolaborasi antara Diskominfo dengan insan



Kabid informatika dan komunikasi publik (IKP) Arif Firmansyah S.STP, M.Si saat memberikan sambutan. (kholis)

media dalam mendukung penyebarluasan informasi publik yang akurat, transparan dan berimbang.

"Kami harap dengan kerjasama yang terjalin ini dapat mewujudkan kemitraan dan hubungan kerjasama yang berkualitas, proporsional dan profesional dengan media," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Diskominfo Pamekasan juga memaparkan rencana pelaksanaan anggaran yang mencakup program komunikasi publik, pengelolaan informasi, penguatan layanan teknologi informasi, serta strategi publikasi kegiatan pemerintah daerah kabupaten Pamekasan melalui kemitraan media. (kholis)

Advokat Suripto, SH. Apresiasi Kinerja Kapolres Banyuwangi



Suripto, S.H., (kanan) & Partners. (Dj)

BANYUWANGI, BN - Kinerja Polresta Banyuwangi di bawah kepimpinan Kombes Pol. Dr. Rama Samtama Putra selama 1 tahun 3 bulan terakhir mendapat apresiasi tinggi dari kalangan praktisi hukum di Kabupaten Banyuwangi.

Advokat senior Banyuwangi, Suripto, SH, menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi Komisaris Pol. Dr. Rama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah ujung timur Pulau Jawa tersebut.

"Kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Kombes Pol. Dr. Rama Samtama Putra selama menjabat Polresta Banyuwangi. Dalam kurun waktu 1 tahun 3 bulan, situasi ketenetraran, keamanan, dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap terjaga aman dan kondu-

sif," ujar Suripto kepada bidiknasional.com, Senin (19/1/2026). Menurut Suripto, keberhasilan ini tidak lepas dari kuatnya sinergitas yang dibangun oleh Kapolresta. "Ini semua berkat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi yang baik antar unsur TNI, Polri, Pemkab Banyuwangi, DPRD, tokoh agama, tokoh masyarakat, wartawan, LSM, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga Kamtibmas di Jawa Timur, khususnya Banyuwangi," tambahnya.

Atas mutasi jabatan tersebut, Suripto juga mendoakan kesuksesan bagi Kombes Pol. Dr. Rama Samtama Putra di tempat tugas yang baru. "Selamat bertugas Komandan sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Papua," ucapnya.

Selain memberikan apresiasi kepada pejabat lama,

Suripto menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Kapolresta Banyuwangi yang baru, Kombes Pol. Dr. Rofiq Ripto Himawan. Ia berharap kepemimpinan yang baru dapat melanjutkan tren positif dalam menjaga stabilitas daerah. Pihaknya siap mendukung program-program kerja Polresta Banyuwangi kedepan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan dan ketertiban masyarakat.

"Kami mendukung penuh Kapolresta Banyuwangi yang baru, Kombes Pol. Dr. Rofiq Ripto Himawan. Harapan kami, Kabupaten Banyuwangi tetap terjaga aman dan kondusif di bawah kepemimpinan beliau. Selamat datang dan selamat bertugas Komandan di Polresta Banyuwangi," tutup Suripto. (Dj)

Mencuri di Terminal, Warga Sukorejo Ditahan di Polres Bondowoso

BONDOWOSO, BN - IM (35 tahun), warga jalan Kawah Ijen, Dusun Sukorejo Lor, Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber Wringin, diketahui telah ditahan di Rutan Polres Bondowoso sejak 26 Desember 2025.

Pria yang juga pernah menghabiskan masa kecilnya di Dusun Tegal Ampel, RT 18/RW 04, Desa Tegal Ampel, Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso ini, menjadi sorotan publik setelah diduga melakukan tindakan pencurian yang terjadi di sekitar Terminal Bondowoso.

Terduga pelaku diberat berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tentang tindak pidana pencurian. Penetapan pasal itu, disesuaikan dengan dugaan perbuatan yang dilakukan oleh IM.

Dari tangan pelaku, Penyidik Polres Bondowoso telah menyita beberapa barang bukti antara lain 1 unit ponsel Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan nomor IMEI 35466877584542 dan 35818341584545, kemudian 1 buah dusbook handphone, serta 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi P 5682 AY beserta kuncinya.

Kasi Humas Polres Bondowoso, Iptu Bobby Dwi Siswanto, mengkonfirmasi bahwa proses penyelidikan terhadap kasus itu terus berlanjut hingga tahap pemeriksaan tersangka (P 21). Kendati demikian, hingga saat ini belum ditemukan tersangka lain yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Untuk proses, terus berlanjut sampai P 21. Untuk tersangka lain, sampai saat ini belum ada. Pasal yang dikenakan sesuai dengan perbuatan pencurian. Tersangka sekarang ditahan di Mako Polres Bondowoso sekitar bulan Desember 2025," ujar Iptu Bobby. Jumat, (16/1/2026).

Dalam pernyataan berikutnya, Iptu Bobby menjelaskan bahwa berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso (tahap 1), untuk dilanjutkan proses hukumnya.

Menariknya, sebelum kasus menggegerkan di Terminal Bondowoso muncul, IM juga pernah diduga melakukan aksi pencurian di kawasan pertigaan lampu merah Desa Kapuran, Kec Wonosari, pada Sabtu (10/5/2025) silam.

Ketika itu, IM disinyalir menjarah tabung gas ukuran 3 Kilogram yang diangkat sopir dan kenek truk muatan LPG. Namun, tindakan tersebut berhasil digagalkan oleh korban, kala mengetahui ulah pelaku saat mereka berhenti menunggu lampu hijau menyala. Dari peristiwa ini, IM langsung dikelar dan dijebloskan di sel tahanan Polsek Wonosari



Tersangka IM (35 tahun)

untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tak cukup sedemikian itu, IM juga pernah diduga mencuri HP Oppo A18 warna biru milik warga Situbondo pada Selasa (29/4/2025), di sekitar pekarangan rumah korban.

Korban dalam kasus dugaan pencurian handphone di Situbondo, mengungkapkan bahwa pada awalnya ia berniat melaporkan IM ke pihak berwajib, namun membatalkannya setelah mengetahui istri pelaku sedang hamil. IM selanjutnya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

"Waktu itu niat saya memang mau melaporkan pelaku, namun karena IM bilang istrinya hamil, akhirnya niat itu saya batalkan. IM juga mengaku telah menyesal dan tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi. Tapi sekarang, saya meyakini itu hanya modus. Dengar IM ditahan, saya berencana akan melaporkannya juga, mengingat dugaan perbuatan pencurian yang berulang," katanya. Sabtu, (17/1/2025).

Di lain tempat,

warga Bondowoso mengungkapkan harapan agar kasus tersebut dapat diselesaikan secara tuntas dan terduga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya.

Menurut warga, hal ini diharapkan supaya dapat menciptakan rasa aman dan nyaman di masyarakat serta memberikan efek jera bagi siapa saja yang mungkin memiliki niat serupa.

Tidak hanya itu, mereka juga mengapresiasi kerja keras Polres Bondowoso dalam mengungkap kasus kriminal tersebut dan meminta proses hukum dapat berjalan dengan adil serta transparan. (agung cornelis)

Wisata Sumenep Jadi Target Para Turis Manca Negara



Bupati Ahmad Fauzi Wongsojudo. (ist)

SUMENEP, BN - Pemerintah Sumenep mengajak kepada Masyarakat Sumenep mendukung kalender berkepanjangan tahun ketahun, hal tersebut disampaikan Bupati Ahmad Fauzi Wongsojudo atas keberhasilan kalender pertahan dengan adanya kunjungan wisatawan selama dua tahun terakhir selalu bertambah inipun dukungan semua elemen masyarakat, pemuda - pemudi, UMKM, pemerhati budaya dan seni juga lingkungan sekitar baik Pemerintah dan warganya.

Kata Bupati Ahmad Fauzi bahwa kalender event bukan sekadar agenda sirimoni, melainkan instrumen pembangunan ekonomi yang dirancang untuk memberi manfaat langsung kepada warga. Maka dari itu, partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mensukseskan program Pemerintah di bidang wisata.

Dan untuk setiap event yang masuk dalam kalender 2026 disusun berdasarkan potensi lokal dan karakter budaya Sumenep. Pendekatan ini sekaligus membuka ruang besar bagi masyarakat untuk terlibat, baik sebagai pelaku seni budaya, penyedia jasa, maupun pemuda berkreasi bisa mengambil hikmahnya. sehingga event-event ini benar-benar hidup karena masyarakatnya terlibat langsung. Wisatawan datang bukan hanya melihat keadaan atau kenyamanan tapi merasakan adat budaya yang berbeda dari daerah lainnya.

Lanjut Bupati Ahmad Fauzi, memberikan semangat pada masyarakat di kepulauan, seperti Gili Iyang dan Kangean, untuk terus menjaga semangat kolaborasi dalam setiap event yang digelar. Keberhasilan festival budaya dan sport tourism di wilayah tersebut menjadi bukti bahwa partisipasi warga mampu mendorong pemerataan ekonomi berbasis wisata di kota keris.

Pada tahun ini (2026) Pemkab Sumenep telah menyiapkan sekitar 110 agenda unggulan dengan konsep yang lebih ramah wisatawan dan berbasis komunitas. Pemerintah berharap kalender event ini tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap sektor pariwisata daerahnya sendiri.

Maka dengan adanya kolaborasi pemerintah dan masyarakat Sumenep mampu tampil sebagai destinasi unggulan di tingkat nasional. Ia menutup dengan ajakan agar seluruh warga menjadikan kalender event 2026 dalam kebangkitan ekonomi dan promosi budaya Sumenep ke tingkat nasional. (yus)

Bupati Cup IX Turnamen Futsal HUT ke-34 SMK Yosonegoro Digelar



MAGETAN, BN - Kemeriahannya Hari Ulang Tahun ke 34 SMK Yosonegoro Kabupaten Magetan dengan berbagai event olahraga termasuk pada hari ini, Rabu (14/1) pembukaan turnamen Futsal Piala Bergilir Bupati Cup IX di GOR Kimaget Kabupaten Magetan.

Pembukaan telah dibuka oleh Nanik Bupati Magetan dengan pemukul Gong dan penyerahan bola kepada panitia pelaksana tanda dimulainya turnamen Futsal yang diikuti 23 peserta SE tingkat SLTA Se-kabupaten Magetan.

Turnamen yang digelar di GOR Kimaget ini dihadiri Ketua KONI Magetan, Seluruh Kepala Sekolah SLTA dan ataupun ada yang mewakili, para peserta turnamen Futsal dan tamu undangan lainnya yang memadati Gedung Olahraga Kimaget Magetan.

Sebelum pembukaan diawali dengan koreografi para siswa-siswi memperagakan tarian massal yang memukau para penonton dan undangan yang hadir.

Ketua ketua pelaksana kegiatan turnamen menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan turnamen termasuk pertanggung jawaban.

Bupati Nanik Sumantri memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana kegiatan ini dan sebelumnya beliau pun dalam sambutannya bahwa pada hari kita semua yang hadir hari ini merupakan bentuk solidaritas sehingga kita bisa berkumpul di gedung ini.

"Kegiatan ini seperti ini merupakan kegiatan yang positif melainkan juga merupakan jalinan silaturrahim dan kegiatan yang bisa menumbuhkan sportifitas dalam olahraga untuk setiap peserta," ucap Nanik Sumantri.

Sementara, Amin Kepala SMK Yosonegoro saat diwawancara, mengatakan bahwa kegiatan turnamen ini dilaksanakan dalam rangka HUT Ke-34 SMK Yosonegoro, dimana dalam turnamen futsal diikuti 23 tim tingkat SLTA Se-kabupaten Magetan.

"Pelaksana kegiatan HUT di awali pada hari Senin kemarin (12/1) dan penutupannya sampai hari Sabtu malam (17/1) dan sebelum di tutup, penyerahan hadiah/piala bagi para juara di GOR Kimaget yang juga dibadiri langsung oleh Kapolres Magetan," ucap Amin.

Akhir kata, Amin pun mengutarakan selain olahraga futsal juga ada VOLLY Ball yang dilaksanakan di SMK Yosonegoro dan juga perlu diketahui jumlah siswa-siswi SMK Yosonegoro ada 1800 siswa dan terbagi dalam 8 jurusan. (Ashar)

Pimpin SDN 155 Gresik, Kasek Baru Tekankan Pentingnya Kolaborasi dan Karakter Religius



Muslimin Kepala Sekolah SD Negeri 155 Krikilan, Driyorejo, Kabupaten Gresik. (Subhan Arif)

GRESIK, BN - Unit Pelaksana Teknis (UPT) SD Negeri 155 Krikilan, Driyorejo, Kabupaten Gresik, resmi memulai babak baru di bawah kepemimpinan Muslimin, S.Pdi. Sabtu (17/1/2026) menjadi hari pertama bagi sosok pendidik asal Pasuruan ini menjalankan tugasnya sebagai Kepala Sekolah (Kasek) di lembaga pendidikan tersebut.

Saat ditemui di ruang kerjanya, Muslimin memaparkan visi kepemimpinannya yang menitikberatkan pada keseimbangan antara profesionalitas kerja dan nilai-nilai religius. Sebagai lulusan Sarjana Pendidikan Islam, ia meyakini bahwa penguan silaturahmi merupakan kunci utama dalam membangun lingkungan sekolah yang harmonis.

"Kami berharap implementasi dari kompetensi religiusitas sebagai tenaga pendidik, yakni ajang silaturahmi, akan membawa keberkahan. Selain itu, tuntutan profesionalitas harus digenapi dengan menjalin kemitraan yang komplementer dengan seluruh pihak," ujar Muslimin kepada awak media.

Terkait latar belakang pendidikannya yang spesifik di bidang agama, Muslimin menegaskan komitmenya untuk tetap menjaga semangat nasionalisme di lingkungan sekolah. Berbekal pengalaman menghadapi kompleksitas keberagaman di tempat tugas sebelumnya, ia optimis mampu membawa UPT SDN 155 Gresik menjadi lembaga yang religius namun tetap berjiwa kebangsaan.

"Meski latar belakang saya adalah pendidikan agama, penguan nasionalisme tetap menjadi prioritas. Kami akan mengemas program-program sekolah dengan nuansa agamis yang inklusif, sehingga nilai-nilai cinta tanah air tetap terjaga di tengah keberagaman yang ada," pungkasnya. (Subhan Arif)

Pembangunan Tugu Batas Wilayah Kec Ujungjaya Sesuai Harapan Masyarakat

SUMEDANG, BN - Pembangunan Tugu untuk batas wilayah Kecamatan Ujungjaya dikerjakan oleh CV. Rahayu Kinansih. Pekerjaan dilaksanakan selama 35 Hari kalender terhitung mulai tanggal 20 November sampai dengan tanggal 25 Desember 2025.

SAAT dikonfirmasi pelaksana pekerjaan menjelaskan bahwa pekerjaan CV. Rahayu Kinansih Alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah mengecewakan hasilnya pun Insya Allah memuaskan. "Ini pekerjaan kami sajikan sesuai batas waktu yang tercantum di Papan Informasi mudah mudahan selesai dengan baik," paparnya.

CV.Rahayu Kinansih ber alamat Kantor di Dsn. Pangjeleran RT.002 RW.001 Ds. Padasuka Kec. Sumedang Utara Kab Sumedang.

Ditambahkan Rana saat dikonfirmasi mengatakan pula bahwa kami mengucapkan Syukur Alhamdulillah pekerjaan bisa dikerjakan tepat waktu tidak ada yang melewati batas waktu yang telah ditentukan kami masih bisa mempertahankan nama baik Perusahaan walaupun cuaca dan kondisi lapangan yang terlihat menghawatirkan disaat saat ini paparnya. (Ernawan)



Proyek Tugu untuk batas wilayah Kecamatan Ujungjaya yang dikerjakan oleh CV. Rahayu Kinansih. (Ernawan).



Warya Supriatna, S.Pd, Menangkan Pilkades Kamal PAW Periode 2025 - 2029

SUMEDANG, BN - Tepat pada tanggal 10 Desember hari Rabu di Ruangan Bale Desa Kamal, telah diadakan Pemilihan Kades PAW di Desa Kamal Kec. Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang. Pemungutan suara dimulai Jam 9.00 WIB dan ditutup kurang lebih

jam 10.00 pagi.

Adapun Panitia mengumumkan hasil perolehan suara akhir diperoleh untuk Kandidat no.1 memperoleh 40 suara dan untuk kandidat no.2 memperoleh 50 suara karena semuanya hanya ada 90 suara yang mewakili masyarakat Desa

Kamal yang diperlukan paikan bahwa semoga ke-

dang. Wajar sekarang memimpin di masyarakat Desa Kamal karena sudah mempunyai bekal kepemimpinan yang akan datang.

Warya Supriatna adalah sosok kepemimpinan sebelumnya memimpin sebagai Kepala Sekolah di beberapa Sekolah di Wilayah Kec. Tanjungmedar Kab Sumedang Ketua BPBD disam-

dang. Wajar sekarang memimpin di masyarakat Desa Kamal karena sudah mempunyai bekal kepemimpinan sudah tidak bakalan salah memimpin, tandas beberapa orang sumber di halaman Desa pada saat Pilkades PAW tanggal 10 Desember 2025. (Ernawan)

Sertijab di Lingkungan Sekretariat Dinas Pendidikan Kec. Wado Berjalan Lancar

SUMEDANG, BN - Serah terima Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kecamatan Wado dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 7 Januari 2026 dilakukan di Ruang Aula PGRI Kec. Wado. Kegiatan dihadiri oleh Kbid SD Dayat Hidayatulloh,S.Pd, Pengawas Bina,Nunung, S.Pd.MM.Pd, K3S dan Ketua PGRI Kec. Wado.

Ketujuh Kepala Sekolah tersebut adalah ; Ajat,S.Pdi asal dari SD Cipamanyan

pindah ke SDN Buahngariung, Ade Slamet,S.Pd dari SDN Sukamanah,Eka Irawati, S.Pd dari SDN Buahngariung ke SDN Cikare I, Nana Suwarna, S.Pd dari SDN Pasirmsigasit ke SDN Galemo, Uka Sukaesih,S.Pd

dari SDN Cikawung ke Batulawang, Dayat, S.Pd dari SDN Cilengkrang ke SDN Cimiron, Nana Suherman, S.Pd dari SDN Cisalak ke SDN Cilengkrang.

Dayat Hidayatulloh selaku Kbid SD dalam sam-

butannya menyampaikan, "Semoga bapak bapak dan Ibu Ibu Kepala Sekolah di tempat yang baru bisa meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi, lancar tidak ada masalah bisa membawa para tenaga pengajar yang

berkualitas semoga Sumedang mendapat rengking pendidik yang lebih baik,"

pungkasnya. (Ernawan)

Rehabilitasi Toilet/Jamban SMPN I Tanjungmedar Tepat Waktu

SUMEDANG, BN - Pekerjaan Rehabilitasi Toilet/Jamban Sekolah Mening Pertama Negeri I Tanjungmedar dikerjakan oleh CV.AZKA & CO. Pekerjaan ini dikerjakan selama 45 hari kalender terhitung mulai Tanggal 17

November 2025 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2025.

Saat dikonfirmasi pelaksana lapangan mengatakan bahwa betul pekerjaan ini dikerjakan oleh CV. AZKA & CO, "Kami mengerjakan pekerjaan ini

berdasarkan Surat Kontrak Kerja No.04/SPK/PPK/Rehab Toilet - SMPN I Tanjungmedar/Disdisk 2025 Tanggal 17 November 2025."

Dikatakan Pelaksana di lapangan mengatakan,

"kami atas nama pekerjaan ini berharap pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu walaupun keadaan cuaca seperti ini. Insya Allah bisa dikerjakan dengan baik dan mudah mudahan tidak ada masalah," tuturnya.

Ditambahkan pula

pelaksana menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Pendidikan atas kepercayaan kepada Perusahaan kami yang saat ini sedang kami kerjakan, paparnya. (Ernawan)

Serah Terima Jabatan Pengawas Bina, Kepala Sekolah SDN di Kec Cisitu, Sukses

SUMEDANG, BN - Serah Terima Jabatan Pengawas Bina,Kepala Sekolah SD di Lingkungan Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 di Ruang Aula Gedung PGRI Kec Cisitu Kab Sumedang.

Serah terima jabatan diantaranya tiga orang pengawas dan empat orang Kepala Sekolah Yaitu Fian Sopianyah, SPd dari Pengawas Kec. Cibugel ke Pengawas Kec. Cisitu, Arie Supriatna, S.Pd, dari Pengawas Kec. Sumedang Selatan ke Kec. Cisitu,namun masih merang-

kap di Sumedang selatan, Wawat Ernawati, SPd dari Pengawas Cisitu alih tugas ke Kec. Cibugel, Rohayati, SPd asal dari Kepala SDN Kawungluwuk II pindah ke SDN Nangerang,Ikoh Rohaeti, SPd asal dari Kepala SDN Nangerang pindah ke SDN Corenda, Dede Kur-

niasih, SPd asal dari Kepala

SDN Bantarjambe pindah ke

SDN Jatiputri, Ratna Nurhaeti, SPd asal dari Kepala

SDN Salamjajar pindah ke

SDN Sukajaya.

Pada saat acara serah terima Jabatan hadir Ketua PGRI Kec. Cisitu, K3S Kec. Cisitu, Para Kepala Sekolah

se Kec Cisitu dan undangan lainnya. Pada saat sambutannya Ketua PGRI Kec. Cisitu mengatakan bahwa semoga mereka yang ber alih tugas dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik.

"Sesuai janji kita diawali

kit dilantik menjadi ASN

mengatakan sanggup ditem-

patkan dimana saja itulah perlu kita ingat dan ditempatkan oleh atasan kita itu merupakan penyegaran ba-

gi kita ditempat yang baru agar lebih semangat dalam menjalankan tugas," tandasnya. (Ernawan)

Rehabilitasi Ruas Jalan Pasirhuni - Jingkang Terkendala Sulitnya Material

SUMEDANG, BN - Pekerjaan Rehab jalan yang menghubungkan Daerah Pasir huni ke Desa Jingkang dikerjakan oleh CV. Nerra Ningsih berdasarkan Surat Kontrak Kerja No.58/01.0044/SPK/PPK - BM/DPUTR/XI/ 2025 Tanggal 24 November 2025.

Pekerjaan ini menurut Pelaksana di lapangan mengatakan bahwa pekerjaan ini dianggarkan sebesar Rp.393.200.000,- (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), dikerjakan selama tiga puluh hari kalender terhitung mulai tanggal 24 November sampai dengan tanggal 23 Desember 2025.

CV.Nerra Ningsih beralamat kantor di Dsn.Sudapati RT.005/RW.001 Kel.Pajagan Kec.Cisitu Kabupaten Sumedang. Saat ditemui, pelaksana di lapangan yang di hadapan Dir.Perusahaan mengatakan bahwa saat ini material sedang sulit mencari pasalnya di lapangan pengusaha banyak yang mengalami Kesulitan sehingga datang juga terlambat kemungkinan besar pekerjaan akan terhambat mudah mudahan saja kami akan bekerja sekutu tenaga agar pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu imbauinya.

(Ernawan)



Proyek Rehabilitasi Ruas Jalan Pasirhuni - Jingkang. (ernawan)

Gubernur Khofifah Resmikan Rehabilitasi dan Revitalisasi 22 Sekolah

□ Kadindik Aries Agung Paewai Sebut Nilainya Rp 23,71 Milliar

PASURUAN, BN - Sebanyak 22 sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB di wilayah Pasuruan dan Probolinggo menerima program rehabilitasi dan revitalisasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

ADAPUN total anggaran yang dikucurkan dalam program tersebut mencapai Rp 23,71 miliar. Rinciannya, rehabilitasi dan revitalisasi fasilitas penunjang di wilayah Pasuruan menyasar 16 sekolah dengan anggaran mencapai Rp 16,33 Miliar.

Sementara untuk rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan fasilitas penunjang di wilayah Probolinggo dengan 7 sekolah menggunakan anggaran senilai Rp 7,38 Miliar.

Program rehabilitasi dan revitalisasi sendiri merupakan upaya pemerintah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang setara baik dari sarana prasarana hingga fasilitas sekolah.

Hasil program revitalisasi dan rehabilitasi ini diremiskan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Kadindik Jatim Aries Agung Paewai bertempat di SMAN 1 Taruna Madani Pasuruan, Minggu (18/1) lalu.

Gubernur Khofifah menegaskan, pelaksanaan program tersebut merupakan komitmen Pemprov Jatim terhadap prinsip keadilan dan kemitraan. Sekolah swasta, termasuk SMA, SMK, dan SLB swasta, adalah mitra strategis pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerataan mutu pendidikan agar peserta didik di daerah memiliki akses lingkungan belajar yang layak dan berkualitas, setara dengan sekolah-sekolah di



Khofifah menandatangani prasasti peresmian pembangunan tersebut. (ist)

wilayah perkotaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai menegaskan bahwa

pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan di Pasuruan dan Probolinggo bukan sekedar proyek fisik, melainkan ikhtiar menghadirkan keadilan pendidikan bagi seluruh anak di Jawa Timur.

“Pemerataan mutu pendidikan menjadi komitmen utama kami. Anak-anak di wilayah Tapal Kuda harus mendapatkan kualitas layanan pendidikan yang sama baiknya, dengan sarana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung

proses pembelajaran,” kata Aries Agung Paewai.

Menurutnya, pemerataan sarana dan prasarana sekolah merupakan fondasi penting dalam membangun kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Sekolah tidak hanya dipandang sebagai bangunan, tetapi sebagai ruang tumbuh bagi karakter, tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa perbaikan fisik sekolah harus diikuti dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Pemanfaatan fasilitas secara optimal, pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, serta inovasi guru dalam proses belajar menjadikan kunci agar pemerataan mutu benar-benar dirasakan oleh siswa.

“Ketika ruang kelas menjadi lebih layak, sanitasi memadai, dan fasilitas pendukung tersedia, maka proses belajar mengajar akan berjalan lebih optimal. Ini akan berdampak langsung pada semangat belajar siswa dan kinerja guru,” tambahnya.

Rehabilitasi dan revitalisasi yang dilakukan mencakup 16 sekolah di wilayah Pasuruan.

Dikemukakan pula, ketertiban sekolah swasta dan SLB dalam program ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan dilakukan secara inklusif dan berkeadilan.

“Sekolah negeri maupun swasta adalah satu ekosistem. Semua memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Karenanya, peningkatan sarana prasarana harus dipandang sebagai investasi bersama untuk masa depan pendidikan Jawa Timur,” tegaskan Aries Agung Paewai.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa perbaikan fisik sekolah harus diikuti dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Pemanfaatan fasilitas secara optimal, pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, serta inovasi guru dalam proses belajar menjadikan kunci agar pemerataan mutu benar-benar dirasakan oleh siswa.

“Tantangan ke depan bukan hanya membangun gedung yang kokoh, tetapi memastikan sekolah-sekolah ini mampu melahirkan generasi yang berdaya saing, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan,” ujarnya.

Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap wilayah Pasuruan dan Probolinggo semakin memiliki sekolah-sekolah yang representatif, ramah anak, dan inklusif, sehingga pemerataan mutu pendidikan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar hadir di ruang-ruang kelas hingga pelosok Tapal Kuda. (dji)

Pemkab Asahan Terima Kunjungan Kerja DPRD Sumatera Utara, Bahas Ranperda Pesantren

ASAHLAH, BN - Pemerintah Kabupaten Asahan menerima kunjungan kerja Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung di Aula Melati Kantor Bupati Asahan. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan, para

Asisten Setdakab Asahan, para Kepala OPD dan Kepala Bagian, serta jajaran DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai forum koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah dan provinsi.

Pada kesempatan tersebut, kunjungan kerja diterima oleh Wakil Bupati Asahan Rianto, yang menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi kepada rombongan Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Dalam pembahasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan komitmennya terhadap visi “Kabupaten Asahan Sejahtera, Religius, Maju dan Berkelanjutan” serta dukungan terhadap visi Presiden Republik Indonesia “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.”

Unsur religius dipandang sebagai bagian penting dari pembangunan daerah, yang salah satunya diwujudkan melalui penguatan peran pondok pesantren. Saat ini, pondok pesantren di Kabupaten Asahan tersebar di 15 kecamatan dengan jumlah

23 pondok pesantren dan total santri mencapai 8.139 orang.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan bahwa pembentukan Ranperda Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren merupakan bentuk pengakuan, perlindungan, dan dukungan negara terhadap pesantren sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Perda ini



Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan saat menerima kunjungan kerja Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. (tp)

diharapkan dapat memperkuat tata kelola pesantren, membangun kemitraan yang sehat, serta mencegah potensi konflik internal, dengan tetap menghormati otonomi, kemandirian, kekhasan, dan tradisi pondok sinergi. (TP)

Klarifikasi Dinas Pertanian Subang Tak Menjawab Persoalan Bantuan Combine



H. Jamali bersama awak media bidik Nasional.



awak media bidik Nasional bersama ketua kelompok tani Saradan Bpk. JAKA.

SUBANG, BN - Klarifikasi yang disampaikan Dinas Pertanian Kabupaten Subang terkait dugaan penyimpangan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan)

jumlah oleh oknum Dinas Pertanian, yang hingga kini belum dibantah maupun diakui secara tegas oleh pihak terkait.

Klarifikasi disampaikan

oleh Kepala Seksi (Kasi) Dinas Pertanian Kabupaten Subang, Sukma, sebagai jawaban atas surat konfirmasi wartawan Bidik Nasional tertanggal 14 Januari 2023.

Namun dalam jawabannya, Sukma hanya menyebutkan bahwa pihaknya telah meminta Inspektorat Kabupaten Subang melakukan pemeriksaan serta menyampaikan bahwa permasalahan tersebut diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang, tanpa memberikan penjelasan spesifik terkait dugaan penerimaan uang Rp 70 juta.

Sikap tersebut dinilai tidak menjawab substansi

pertanyaan media, sehingga memunculkan persepsi publik bahwa persoalan inti justru dihindari.

Kronologis Dugaan Penyimpangan Bantuan Com-

bine 2023, berdasarkan hasil penelusuran dan konfirmasi awak media Bidik Nasional, bantuan alsintan jenis combine harvester Maxxi Bimo 102 dialokasikan untuk Kelompok Tani Saradan, Desa Kalen Tambo, Kec Pusaknagara, Kab Subang.

Ketua Kelompok Tani Saradan, Jaka, menyatakan kepada awak media bahwa dirinya tidak pernah menerima maupun menguasai bantuan combine tersebut.

ia mengakui hanya diminta hadir dan menandatangi dokument administrasi penerimaan tanpa mengetahui proses pengusulan, pengelolaan, maupun operasional alat di lapangan.

Lanjutnya Jaka, Bantuan combine tersebut diduga tidak dikelola oleh kelompok tani penerima, sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan keberadaannya di

lapangan tidak diketahui secara jelas oleh pengurus kelompok, ucapnya.

Tempat terpisah awak media Bidik Nasional kemudian melakukan konfirmasi langsung kepada H. Jamali,

yang mengakui adanya penyerahan uang sebagaimana dimaksud sebesar Rp 70.000.000.(tujuh puluh juta) kepada Sukma selaku kasi Dinas pertanian Subang.

Perlu dilaruskan, H. Jamali bukan anggota Kelompok Tani Saradan, melainkan merupakan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalen Tambo dengan jabatan sebagai Wakil Ketua BPD.

Awak media juga mengantongi bukti rekaman yang dinilai relevan dengan pengakuan adanya penyerahan uang tersebut.

Menindaklanjuti temuan tersebut, awak media mengirimkan surat konfirmasi

resmi kepada Dinas Pertanian Kabupaten Subang untuk meminta penjelasan terkait dugaan penerimaan uang Rp 70 juta.

Dalam jawabannya, pihak Dinas Pertanian tidak memberikan bantahan atau pengakuan secara tegas, melainkan menyebutkan telah meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan dan menyatakan persoalan tersebut telah diklarifikasi oleh Kejari Subang.

Klarifikasi tersebut dinilai belum menyentuh substansi utama, yakni ada atau tidaknya penerimaan uang Rp 70 juta oleh oknum Dinas Pertanian.

Menanggapi hal ini, Advokat Muda Prabu Lawyer menyampaikan, apabila terbukti adanya penerimaan uang oleh pejabat atau penyelenggara negara, maka perbuatan tersebut berpotensi masuk dalam kategori gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (tohir)

Oknum Guru SMAN I Aek Kuo Diduga Lakukan Bullying Terhadap Murid

LABUANBATU, BN - Aek Korsik, warga kota solidaritas perempuan merdeka Labuhanbatu Raya, mengaku miris setelah mendengar bullying guru terhadap murid di SMA Negeri 1 Aek Kuo, Labuhanbatu Utara.

Menurut Nissa, hal tersebut disampaikan oleh beberapa siswa SMA Negeri 1 bahwa mereka sering mendapat perlakuan buruk dari beberapa oknum guru. “Beberapa murid menyatakan kepada saya, bahwa mereka sering dimaki dengan kata-kata kasar, kadang dikatakan mungkin tidak diri oleh beberapa oknum guru di sekolahnya. Hal tersebut tidak mencerminkan sebagai pendidik yang baik untuk generasi muda,” ujar Nissa Dalimunthe.

Bersambung ke hal.11 kol.5



KEHILANGAN SERTIPIKAT TANAH

Telah hilang Sertipikat Hak Milik Nomor : 00332 SPPT: 32.18.061.004.003-0227.0, Luas Tanah 317 M2, Terletak di Kp Katimaha RT 003/RW 006, Desa Karanganyar, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, atas nama NURHAYATI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga alamat rumah Kp Katimaha RT 002/RW 006, Desa Karanganyar, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi. Bagi yang menemukan mohon menghubungi Ibu Nurhayati.

Bupati Asahan Uji Terbang Drone Pertanian di Lahan Pangan Padi Gogo Kodim 0208/AS



Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si. saat uji terbang drone pertanian di lahan pangan tanam padi gogo Kodim 0208/Asahan. (TP)

ASAHAH, BN - Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si. Melakukan uji terbang drone pertanian di lahan pangan tanam padi gogo Kodim 0208/Asahan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Asahan terhadap pemanfaatan teknologi modern di sektor

pertanian, Rabu (31/12/2025). Tampak hadir Dandim 0208/AS, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, Perwakilan PT Kurin Muria Gemilang, TNI, Kelompok Tani serta hadirin lainnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan modernisasi pertanian

sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Drone pertanian tersebut dimanfaatkan untuk membantu pemantauan lahan, penyemprotan pupuk, serta pengendalian hama secara lebih efektif dan efisien.

Bupati Asahan dalam keterangannya menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi pertanian menjadi kebutuhan penting dalam menjawab tantangan pertanian saat ini, terutama keterbatasan tenaga kerja dan luasnya lahan pertanian.

"Pemanfaatan drone pertanian ini merupakan langkah maju dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Asahan. Dengan teknologi ini, pekerjaan petani menjadi lebih efisien, hemat waktu, dan hasilnya diharapkan semakin optimal," ujar Bupati

Melalui uji terbang drone pertanian ini, Bupati Asahan berharap ke depan teknologi pertanian modern dapat semakin luas diterapkan oleh para petani, sehingga sektor pertanian di Kabupaten Asahan semakin maju, mandiri, dan berdaya saing. (TP)

Pemkab Lantik Anggota KPAD Kabupaten Asahan Periode 2026–2030



Pelantikan Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan. (TP)

ASAHAH, BN - Pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan masa jabatan 2026–2030 di Aula Melati Kantor Bupati Asahan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan perlindungan anak di daerah dan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan terkait.

Pelantikan Anggota KPAD Kabupaten Asahan periode 2026–2030 tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Asahan Rianto, yang secara resmi mengambil sumpah jabatan para anggota KPAD. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen, integritas, serta sinergi lintas sektor dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Asahan.

Ketua KPAD Kabupaten Asahan terpilih masa jabatan

2026–2030, Awaluddin, S.Ag., M.H., menyampaikan bahwa KPAD akan menjalankan tugas secara profesional dan independen dengan fokus pada pencegahan, edukasi, serta penanganan kasus anak secara komprehensif. Ia menegaskan komitmen KPAD untuk memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Asahan, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat.

Pelantikan ini menjadi awal pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota KPAD Kabupaten Asahan periode 2026–2030 dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan layak bagi tumbuh kembang anak. Adapun susunan Anggota KPAD Kabupaten Asahan masa jabatan 2026–2030 terdiri atas Eva Lusiana Munthe, S.KM.; Awaluddin, S.Ag., M.H.; Sabar Mulia Panjaitan, S.H.; Mohd. Siddiq; dan Nina Waslina, S.E., yang diharapkan mampu menjalankan amanah secara optimal demi terwujudnya Kabupaten Asahan yang peduli dan ramah anak. (TP)

Wabup Asahan Hadiri Tasyakuran HAB ke-80 Kemenag



ASAHAH, BN - Kementerian Agama Kabupaten Asahan menggelar Tasyakuran Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2026 dengan mengusung tema "Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju". Kegiatan tersebut dilaksanakan di Halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan, Rabu (07/01/2026).

Acara tasyakuran ini dihadiri oleh Wakil Bupati Asahan, mewakili Kejaksaan Negeri Asahan, mewakili Kapolres Asahan, mewakili Dandim 0208/Asahan, mewakili Danlanal TBA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan bersama jajaran, serta tamu undangan lainnya.

Dalam laporannya, Ketua Panitia yang juga Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Asahan, Hj Sri Muchlis SSos MIKom menyampaikan bahwa HAB ke-80 merupakan hari yang penuh kebahagiaan dan rasa syukur karena seluruh jajaran Kementerian Agama masih dapat bersama-sama mengabdikan

kepada bangsa dan negara. Ia berharap, di usia ke-80 ini, Kementerian Agama Kabupaten Asahan dapat memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi masyarakat serta membangun sinergi dan harmoni untuk melaksanakan hal-hal yang lebih bermakna. (TP)

80 merupakan momentum rasa syukur kepada Allah SWT atas perjalanan panjang Kementerian Agama yang telah berdiri selama 80 tahun sebagai penjaga nalar agama dalam bingkai kebangsaan.

Ia menegaskan bahwa

peran Kementerian Agama saat ini semakin luas dan krusial, tidak hanya dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, tetapi juga dalam merawat kerukunan umat beragama yang berlandaskan cinta kemanusiaan, memberdayakan ekonomi umat, serta memastikan agama hadir sebagai sumber solusi atas berbagai persoalan bangsa.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan, H Abdul Manan MA dalam sambutannya menyampaikan bahwa HAB ke-80 merupakan hari yang penuh kebahagiaan dan rasa syukur karena seluruh jajaran Kementerian Agama masih dapat bersama-sama mengabdikan

karena itu, peringatan Hari Amal Bakti harus dijadikan sebagai momentum perenungan dan evaluasi atas seluruh amal bakti kepada umat negara, dan bangsa, sekaligus membangun sinergi dan harmoni untuk melaksanakan hal-hal yang lebih bermakna. (TP)

80 merupakan momentum rasa syukur kepada Allah SWT atas perjalanan panjang Kementerian Agama yang telah berdiri selama 80 tahun sebagai penjaga nalar agama dalam bingkai kebangsaan. Selain itu, ia menegaskan bahwa pada tahun 2026 Kementerian Agama Kabupaten Asahan harus mampu mensinergikan seluruh program kerjanya dengan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Wakil Bupati Asahan Rianto SH MAP dalam sambutannya menyampaikan bahwa kondisi yang telah

dicapai Kementerian Agama hingga usia 80 tahun patut disyukuri dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan umat dan bangsa. Ia berharap peringatan HAB tidak hanya bermilai seremonial, tetapi mengandung makna untuk meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial terhadap lingkungan sekitar.

Menurutnya, di tengah pesatnya pembangunan di berbagai bidang, masih terdapat masyarakat yang membutuhkan uluran tangan dan perhatian bersama. Oleh

Polisi lalu melakukan pengejalan terhadap orang yang melarikan diri tersebut dan berhasil mengamankan dua orang Perempuan yang mengaku bernama berinisial Anggun (23) pekerja ibu rumah tangga dan Tiwi (29). Sedangkan satu orang laki-laki yang tidak diketahui namanya berhasil melarikan diri, setelah dua orang

Bupati Asahan Lepas Bantuan Korban Bencana di Sumut, Aceh dan Sumbar



Bupati Asahan saat melepas bantuan untuk korban bencana alam. (ist)

ASAHAH, BN - Bupati

Asahan bersama Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Tanjung Balai Asahan serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Asahan secara resmi melepas bantuan kemanusiaan untuk para korban bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor Bupati Asahan, Selasa (30/12/2025). Pelepasan bantuan ini turut dihadiri dan didampingi oleh para Asisten Pemerintah Kabupaten Asahan, Staf Ahli Bupati Asahan, Kepala Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, para Kepala Bagian Setdakab Asahan, Camat se-Kabupaten Asahan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Imtaq, Forkala, tokoh-tokoh agama tokoh etnis serta perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Asahan.

Bantuan yang disalurkan merupakan hasil donasi dari Pemerintah Kabupaten Asahan bersama masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap saudara-saudara yang terdampak bencana. Adapun bantuan yang dilepas meliputi berbagai kebutuhan pokok, antara lain beras sebanyak 12.010 kg, mi instan 478 kotak, pop mie 124 kotak, air mineral 195 kotak, roti 27 kotak, minyak goreng 147 liter, pakaian layak pakai 357 karung, kebutuhan bayi (pampers) 13 kotak, gula putih 15 kg, susu 13 kotak, sarden 4 kotak, kacang hijau 10 kg, serta kebutuhan medis berupa obat-obatan dan tikar.

Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si, menyampaikan bahwa bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban bencana serta menjadi wujud nyata kepedulian Pemerintah Kabupaten Asahan bersama seluruh elemen masyarakat. "Semoga bantuan ini dapat sampai kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan dan memberikan manfaat bagi mereka yang sedang tertimpas musibah. Ini adalah bentuk kebersamaan kita dalam menghadapi bencana," ujar Bupati Asahan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Asahan juga menyampaikan doa dan harapan agar ke depan, khususnya memasuki tahun 2026, Kabupaten Asahan menjadi daerah yang lebih baik lagi, aman, damai, dan sejahtera serta pembangunan dapat berjalan dengan lancar dalam bingkai kesatuan Republik Indonesia. (TP)

Perkuat Ketahanan Pangan, Pemkot Pagar Alam Kembangkan Budidaya Bawang Merah



Budidaya bawang merah oleh Pemkot Pagar Alam. (ist)

PAGARALAM, BN - Pemerintah Kota Pagar Alam terus berupaya menelek lalu inflasi dan memperkuat ketahanan pangan, salah satunya melalui pengembangan budi daya bawang merah. Upaya tersebut ditandai dengan panen raya bawang merah varietas Bima di Kelurahan Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah, Rabu 14 Januari 2026.

Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah didampingi Sekretaris Daerah Zaily Oktobri Fitri Abidin mengatakan, budi daya bawang merah merupakan langkah strategis untuk menjaga ketersediaan pangan dan menstabilkan harga di pasaran. Ia mengapresiasi para petani Pelang Kenidai atas keberhasilan panen yang dinilai membuktikan sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ketahanan pangan daerah.

Menurut Wali Kota, varietas Bima memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Pagar Alam. Pemerintah daerah berkomitmen mendukung sektor pertanian melalui peningkatan sarana prasarana, pendampingan teknis, serta penguatan kelompok tani guna mewujudkan swasembada pangan. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menerima rompi Satgas Swasembada Pangan dari Kementerian Pertanian RI sebagai simbol tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan.

Sementara itu, Ketua Komunitas Petani Bawang Merah Kota Pagar Alam, Supri, menyampaikan harapan agar petani mendapatkan bimbingan teknis dari dinas terkait untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang budi daya Bawang Merah.

Menurutnya, produksi bawang merah di Pagar Alam saat ini masih relatif terbatas dan masih didominasi pasokan dari luar daerah. Meski demikian, dari sisi kualitas, bawang merah Pagar Alam dinilai tidak kalah bersaing. "Kami sangat berharap adanya pendampingan dan bimbingan teknis, khususnya dalam budidaya bawang merah, agar produksi lokal dapat terus meningkat," ujar Supri. (leo)

Satres Narkoba Polres Pagar Alam Ringkus Dua Cewek Pengedar Sabu



Dua tersangka pengedar Sabu yang ditangkap Satres Narkoba Polres Pagar Alam. (ist)

PAGARALAM, BN - Satres Narkoba Polres Kota Pagar Alam menunjukkan kinerjanya. Selasa (13/01/2026) sekitar pukul 00.30 wib berhasil menangkap dua pengedar sabu di pasar Nendangung Jl. Letnan Muda Nur Majais Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam.

Menurutnya, produksi bawang merah di Pagar Alam saat ini masih relatif terbatas dan masih didominasi pasokan dari luar daerah. Meski demikian, dari sisi kualitas, bawang merah Pagar Alam dinilai tidak kalah bersaing. "Kami sangat berharap adanya pendampingan dan bimbingan teknis, khususnya dalam budidaya bawang merah, agar produksi lokal dapat terus meningkat," ujar Supri. (leo)

Kasat Res Narkoba Polres Pagar Alam Iptu Doris Pidiandi, S.H., M.Si menyampaikan, berawal dari laporan masyarakat di daerah pasar terminal sering dijadikan tempat transaksi narkotika. Kemudian dilakukan penyelidikan oleh Anggota Satres Narkoba didaerah tersebut didapatkan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dengan gerak gerik yang mencurigakan saat dihampiri oleh petugas Satres Narkoba satu orang laki-laki dan satu orang perempuan melarikan diri.

Polisi lalu melakukan pengejalan terhadap orang yang melarikan diri tersebut dan berhasil mengamankan dua orang Perempuan yang mengaku bernama berinisial Anggun (23) pekerja ibu rumah tangga dan Tiwi (29). Sedangkan satu orang laki-laki yang tidak diketahui namanya berhasil melarikan diri, setelah dua orang

tersebut, dua orang perempuan berinisial Anggun dan Tiwi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Pagar Alam guna pemeriksaan lebih lanjut. Kedua pelaku dikenakan pasal 114 (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 ttg Narkotika Jo UU No 1 Tahun 2026 ttg penyesuaian pidana dan atau pasal 609 (1) hurup a UU No 1 Tahun 2023 ttg Kuhp Jo UU No 1 Tahun 2026 ttg penyesuaian pidana Jo pasal 132 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ungkap Iptu Doris Pidiandi, S.H., M.Si.

Sementara itu, Kapolres Pagar Alam AKBP Januar Kencana Setia Persada, S.I.K melalui Kasi Humas Iptu Mansyur, S.H. keduanya pelaku akan dikenakan pidana yang berat sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. (leo)

MUI Kabupaten Pinrang Gelar Musyawarah Daerah Ke-7

PINRANG, BN - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pinrang menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-7 yang berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Kab. Pinrang, Sabtu (10/1/2026)

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran ulama sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembinaan umat dan pembangunan sektor keagamaan di Kabupaten Pinrang.



Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi, S.I.P., M.Si, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa peran MUI sangat vital dalam mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Pinrang membentuk masyarakat yang religius, harmonis, dan berakhhlak mulia.

Menurutnya, ulama memiliki posisi strategis sebagai pembimbing umat, terutama dalam menjaga nilai-nilai keagamaan di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Olehnya itu, sinergi antara ulama dan pemerintah (umara) menjadi hal yang mutlak dilakukan. "Jika ulama dan pemerintah berjalan seiring, maka umat akan ikut bersatu. Sinergi ini menjadi fondasi kuat dalam menciptakan masyarakat yang religius, rukun, dan berkontribusi positif dalam pembangunan daerah," ungkap Wabup Sudirman.

Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa MUI merupakan wadah yang tepat dalam menghimpun peran ulama untuk bersama-sama membina umat, khususnya di Kab. Pinrang yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Keputusan-keputusan yang dihasilkan melalui Musda ini diharapkan mampu membawa MUI Pinrang semakin optimal dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengayoman umat.

Dalam Musda ke-7 ini, KH. Masse Laibu terpilih secara akhir sebagai Ketua MUI Kabupaten Pinrang, setelah sebelumnya menjabat selaku Pelaksana tugas Ketua MUI Pinrang, mengisi kekosongan jabatan setelah ditinggalkan oleh KH. Abd. Salam Latarebbi yang wafat beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Ketua MUI Pinrang terpilih KH. Masse Laibu dalam penyampaiannya mengungkapkan komitmennya untuk terus memperkuat peran MUI sebagai penjaga nilai-nilai keislaman dan pembina umat melalui program kerja yang akan disusun bersama pengurus.

Dirinya berharap, keberadaan MUI ke depan dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam membentuk umat yang berakhhlak, moderat, dan menjunjung tinggi persatuan.

"Peran MUI adalah memastikan umat terus berada pada jalan kebaikan, sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW, serta menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan umat," tutupnya.

Melalui Musda ini, diharapkan sinergi ulama dan pemerintah semakin kokoh demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Pinrang yang religius, damai, dan sejahtera.

(*sabir)

Hadiri Pisah Sambut Wakapolres Lambar, Wabup Harap Sinergitas Dapat Ditingkatkan

LAMPUNG BARAT, BN - Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin menghadiri acara pisah sambut Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Lampung Barat dari pejabat lama, Kompol Samsuri, S.H., M.H digantikan Kompol Abdul Rasyid, S.H., M.H, Senin 12 Januari 2026.

Untuk diketahui, Samsuri yang sebelumnya menjabat Wakapolres Lampung Barat pindah ke Polres Kabupaten Prengsewu dengan jabatan yang sama. Sementara Abdul Rasyid sebelumnya menjabat sebagai Kabag Ops Bandar Lampung.

Dalam sambutannya, Mad Hasnurin mengatakan kegiatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan momentum penting untuk memperkuat silaturahmi, menjaga kesinambungan kepemimpinan, serta meneuhkan kembali komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban



Pisah sambut Wakapolres Lambar. (ist)

masyarakat di Kabupaten Lampung Barat.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan seluruh masyarakat, ia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Kompol Samsuri, S.H., M.H. atas pengabdian, dedikasi, dan kerja keras yang telah diberikan selama bertugas di Lampung Barat.

"Berbagai dinamika dan tantangan keamanan di wilayah Lampung Barat, baik yang berkaitan dengan kondisi geografis, sosial kemanusiaan, maupun agenda-agenda strategis daerah, telah dihadapi dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme," kata Md Hasnurin.

Menurutnya, sinergi yang terjalin antara Polres Lampung Barat dengan Pemerintah Daerah, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat selama ini telah memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif.

Hal ini menjadi modal penting dalam mendukung kelancaran pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu Mad Hasnurin menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang tinggi, serta mendoakan agar Samsuri senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam melanjutkan pengabdian di tempat tugas yang baru.

Selanjutnya, Mad Hasnurin menyampaikan selamat datang kepada Wakil Kepala Kepolisian Resor Lampung Barat yang baru Kompol Abdul Rasyid, S.H., M.H. "Atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Kab Lampung Barat," ujarnya. (Taufik)



Ketua KPU Kabupaten OKI Muhamad Irsan, SE. (ist)

KPU OKI Tunggu KPU RI Terkait PAW

OKI, BN - HI, yang menjabat sebagai Komisioner Divisi Perancangan Data dan Informasi, diduga terlibat tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4.728.709.454. Penetapan tersangka dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) OKI dan saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incrah).

Vonis ini dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Sangkot Lumban Tobing di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Palembang Jumat (14/11/2025).

Dalam amar putusannya, kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Mengadili, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hadi Irawan dan Ihsan Hamidi masing-masing selama 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan."

Terkait keputusan tersebut ketua KPU Kabupaten OKI

Muhamad Irsan, SE mengatakan permasalahan gaji untuk saudara HI, saat diputus bersalah gaji HI sudah tidak diberikan lagi oleh sekretariat KPU, tegas Irsan.

Kalau untuk PAW butuh proses, kami menunggu arahan dari KPU RI dahulu. Harus dilakukan pemberhentian dahulu, kami juga masih menunggu Surat Keputusan tersebut, KPU OKI hanya menunggu dari KPU RI melalui KPU provinsi Sumatera Selatan, kita berkoordinasi saja, keputusan ada pada KPU RI melalui KPU provinsi.

Irsan mengatakan, KPU OKI juga sedang menunggu proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk mengisi kekosongan komisioner KPU OKI, setelah ditinggalkan HI yang kini menjalani hukuman dipegang oleh ketua.

Kita berharap kekosongan komisioner tersebut dapat segera terisi karena mengingat tugas sudah menunggu dari pemuktahiran data pemilihan tahun 2027 pertengahan kita sudah mulai persiapan untuk pemilihan umum 2029, jelas Irsan. (Nurlis)

termasuk lembaga pendidikan tinggi sebagai pencetak generasi penerus bangsa.

Menurutnya, di era digitalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini, tantangan yang dihadapi para lulusan muda semakin kompleks. Olehnya itu, dibutuhkan kesiapan mental, kemampuan beradaptasi, serta komitmen yang kuat untuk ikut mengambil peran dalam pembangunan.

Wabup Sudirman mengajak para lulusan STKIP DDI Pinrang untuk takut mulai dari hal-hal kecil. Menurutnya, langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan menjadi pondasi menuju masa depan yang lebih besar. (*sabir)

Wabup Pinrang Sudirman Bungi Hadiri Wisuda Sarjana STKIP DDI Pinrang

PINRANG, BN - Pemerintah kabupaten Pinrang menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan seluruh pihak dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya pada sektor pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi, S.I.P., M.Si saat memberikan sambutan pada Sidang Senat Terbuka Luar Biasa Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) DDI Pinrang, yang digelar di The M Hotel, Kamis (8/1/2026)

Dalam penyampaiannya, Wabup Sudirman mengungkapkan bahwa pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi dan kontribusi seluruh elemen,

Pemkab Lambar Reformasi Arah Pendidikan, Disiplin, Literasi dan Inovasi Diperketat



Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus bersama staf saat rapat koordinasi Pendidikan Tahun 2026. (taufik)

LAMPUNG BARAT, BN - Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus bersama staf jajaran menggelar rapat koordinasi Pendidikan Tahun 2026, Rapat koordinasi yang dihadiri kepala OPD, camat, serta kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Lampung Barat di Aula Kagungan Setdakab setempat.

Pemerintah Kabupaten

Lampung Barat menegaskan komitmen memperkuat kualitas pendidikan melalui sinergi lintas sektor. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, saat memimpin Rapat Koordinasi Pendidikan Tahun 2026, di Aula Kagungan Rabu (14/1/2026).

Rapat koordinasi yang dihadiri kepala OPD, camat, serta kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Lampung Barat itu menjadi forum strategis menyatakan langkah meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh.

Bupati Parosil menekankan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan kurikulum, tetapi juga oleh keteladanannya para pimpinan sekolah. Menurutnya, kepala sekolah memegang peran sentral dalam membangun budaya disiplin.

"Kepala sekolah harus menjadi contoh. Disiplin itu dimulai dari pimpinan. Kalau kepala sekolah datang pagi dan menyambut siswa, itu memberi pesan kuat tentang kepedulian dan tanggung jawab," ujar Parosil.

Ia menilai kehadiran kepala sekolah di pagi hari bukan sekadar rutinitas, melainkan simbol pengawasan dan pembentukan karakter peserta didik sejak dini. Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim sekolah yang lebih tertib dan humanis.

Selain kedisiplinan, Parosil juga menyoroti pentingnya penguatan budaya literasi. Ia meminta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merancang program kunjungan sekolah ke perpustakaan daerah sebagai bagian dari pembelajaran di luar kelas.

"Literasi tidak boleh berhenti di ruang kelas. Kita dorong anak-anak datang ke perpustakaan, membaca, dan menjadikan literasi sebagai kebiasaan," kata Parosil.

(Taufik)

2026, Direktur Perumda Air Minum Waemanurung Fokus Perbaikan Pipa Tua

BONE, BN - Direktur Perumda Wae Manurung Bone Muh.Bachtiar Sairing, S.Sos fokus perbaikan pipa PDAM ditahun 2026 yang sudah tua demi meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap pelanggan.

Muh. Bachtiar Sairing terus melakukan konsolidasi sesama Pemerintah daerah untuk pelayanan terhadap masyarakat utama air yang tidak mengalir dengan baik di setiap pelanggan.

"Ditempat terpisah Wakil Bupati Bone, Dr Andi Akmal Pasludin, SP, MM akan terus berkoordinasi dengan Direktur Perumda Air Minum WM untuk terkait instalasi PDAM yang kurang bagus yang mengakibatkan tidak lancarnya air mengalir ke rumah pelanggan," tutur A.Akmal saat debat Publik di Cafe 24 Jalan Veteran Kelurahan Watampone.

Andi Agus warga Watampone berharap air PDAM berharap airnya lancar mengalir di setiap rumah pelanggan,karena itu adalah keluhan masyarakat,itu disampaikan kepada Wakil Bupati Bone saat dialog publik. (Suspi)



Direktur Perumda Wae Manurung Bone Muh.Bachtiar Sairing, S.Sos.

Pemkab Pinrang Syukuran Swasembada Pangan



kan langsung Presiden Prabowo Subianto saat memimpin Panen Raya sekaligus pengumuman swasembada pangan yang digelar secara hybrid, Rabu (7/1/2026)

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa berbagai langkah strategis yang dilakukan hampir satu tahun terakhir akhirnya membuat hasilnya nyata.

Presiden menegaskan, keberhasilan swasembada pangan ini merupakan buah dari kerja kolektif seluruh pihak, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait, hingga para petani yang disebutnya sebagai pahlawan bangsa.

"Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya. Namun, kesejahteraan tidak akan terwujud jika kebutuhan pangan masih bergantung pada negara lain. Inilah semangat besar yang mendorong kita untuk mencapai swasembada pangan," ungkap Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, swasembada pangan bukan sekadar capaian sektor pertanian, tetapi menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan sektor lainnya yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Presiden pun menyampaikan rasa bangga atas capaian tersebut dan berharap keberhasilan ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Pertanian Republik Indonesia, A. Amran Sulaiman, mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan swasembada pangan ini. Sementara Pemkab Pinrang melakukan syukuran atas keberhasilan swasembada pangan ini. (*Sabir)



Sudirman Bungi, saat menghadiri Sidang Senat Terbuka Luar Biasa Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) DDI Pinrang. (ist)

Soal Hunian Tak Layak Huni, Ketua Sundawani Nilai Ada Pembiaran Sistemik



Ketua Sundawani Wirabuana Kuningan Kota, Dian Basudiman (Ed)

buana Kuningan Kota, Dian Basudiman, menyebut kondisi tersebut sebagai alarm keras atas lemahnya keberpihakan kebijakan pada kebutuhan paling dasar masyarakat. "Ketika rumah sudah tidak aman untuk ditinggali, itu bukan lagi soal bantuan sosial, tapi soal tanggung jawab negara melindungi warganya," kata Dian, Selasa (20/1/2026).

Menurut Dian, kasus rumah warga retak berat di Desa Sangkanhurip, Kecamatan Cigandamekar, menunjukkan adanya celah besar antara laporan lapangan dan respons birokrasi. Rumah milik Titin Sutinah, yang me-

Ketua Sundawani Wirabuana Kuningan Kota, Dian Basudiman (Ed)

ngalami kerusakan pada sejumlah bagian vital bangunan, hingga kini belum mendapatkan penanganan memadai, meski kondisinya dinilai mengancam keselamatan penghuni.

Kondisi serupa juga ditemukan di Desa Lengkong, Kecamatan Garawangi. Seorang janda lanjut usia bernama Utin terpaksa bertahan di rumah yang telah lama dinyatakan tidak layak huni bersama anak dan cucunya. "Ini bukan kasus tunggal. Ini potret sistem yang tidak bekerja. Laporan sudah masuk, data sudah ada, tapi responsnya nihil," ujar Dian.

Ia menilai, persoalan rumah tidak layak huni seharusnya menjadi prioritas uta-

ma dalam perencanaan pembangunan daerah, bukan sekadar pelengkap program.

"Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari proyek besar dan seremoni. Ukurannya adalah apakah warga paling rentan merasa aman di rumahnya sendiri," tegaskan.

Sundawani Wirabuana Kuningan Kota mendorong Pemkab Kuningan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan perumahan, serta memastikan adanya langkah darurat bagi warga yang tinggal di hunian berisiko tinggi. "Jika negara baru hadir setelah rumah roboh, itu bukan kehadiran, tapi penyesalan," pungkas Dian Basudiman. (Ed)

Kapolres Silaturahmi ke Kajari Labuhanbatu



Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si saat mengunjungi Kajari Labuhanbatu. (ist)

LABUHANBATU, BN – Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si didampingi para Pejabat Utama (PJU) Polres Labuhanbatu melaksanakan kunjungan kerja dan silaturahmi ke Kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu yang berlokasi di Jalan S.M. Raja, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, pada Selasa, 20 Januari 2026.

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Asnath Anytha Idatua

Hutagalung, S.H., M.H. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban sebagai bentuk penguatan hubungan kelembagaan antara Polres Labuhanbatu dan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Labuhanbatu bersama Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dalam menjaga harkamtibmas di wilayah hukum Polres Labuhanbatu. Selain itu, kedua pimpinan sepakat untuk saling berkolaborasi dalam bidang penegakan hukum serta meningkatkan hal-hal positif yang selama ini telah terjalin dengan baik demi memberikan pelayanan hukum yang maksimal kepada masyarakat.

Kunjungan kerja dan silaturahmi ini diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi lintas institusi, sehingga pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si menyampaikan bahwa sinergitas antara Polri dan Kejaksaan merupakan kunci utama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum di Kabupaten Labuhanbatu. (M.Sukma)

DPA Pemkab OKI 2026 Fokus Anggaran Prioritas, Realisasi Digas



Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki menyerahkan DPA Tahun Anggaran 2026. (Nurlis)

OKI, BN – Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H. Muchendi Mahzareki menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI, Selasa (13/1/2026).

Pada 2026, Pemkab OKI mengelola anggaran sebesar Rp 2,2 triliun. Angka tersebut menurun Rp 245 miliar dibandingkan tahun sebelumnya akibat pengurangan transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat.

Meski demikian, Bupati Muchendi menegaskan penurunan anggaran tidak boleh menjadi alasan lambannya pelaksanaan program dan pelayanan publik.

"Anggaran kita tahun ini Rp 2,2 triliun, memang turun. Namun tidak ada ruang untuk menunda pelaksanaan kegiatan. DPA sudah diserahkan, realisasi harus segera berjalan," kata Muchendi saat memberikan arahan di Ruang Rapat Bende Seguguk, Kantor Bupati OKI, Selasa (13/1).

Muchendi menekankan pengelolaan anggaran harus difokuskan pada program prioritas kepala daerah, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ia meminta OPD memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Selain penajaman prioritas, Muchendi juga menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas serta percepatan realisasi anggaran. Menurut dia, keterlambatan realisasi akan berimbas pada tertundanya manfaat program dan perputaran ekonomi daerah. "Kita sedang menghadapi efisiensi, maka belanja harus tepat sasaran. Kurangi kegiatan seremonial yang tidak mendeskripsikan ke program produktif. Realisasi anggaran harus digas karena memberi multi player effect kepada masyarakat," ujarnya.

Muchendi juga menekankan pentingnya koordinasi lintas OPD dalam menuntaskan permasalahan pembangunan. "Tahun 2025 sudah kita lakukan. Sinkronasi dan koordinasi antar OPD jadi kunci keberhasilan program," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) OKI Farlidena Burniat mengatakan APBD Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.214.261.273.780 dan disusun berdasarkan regulasi terbaru, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. "Penyerahan DPA ini menjadi dasar bagi OPD untuk segera melaksanakan kegiatan dan mempercepat realisasi anggaran. Pendapatan dan belanja

daerah dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer," kata Farlidena.

Ia menambahkan, Pemkab OKI juga menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada 38 OPD guna meminimalkan penggunaan uang tunai dan mempercepat transaksi belanja.

"Penerapan KKPD merupakan bagian dari modernisasi sistem pembayaran pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan pengendalian internal," ujarnya. Selain penyerahan DPA kepada 54 OPD, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pembagian KKPD kepada 38 OPD. Adapun OPD penerima DPA terdiri atas 23 dinas, 7 badan, 2 sekretariat, 2 rumah sakit umum daerah, Inspektorat, Satpol PP dan Damkar, serta 18 kecamatan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. (Nurlis)

Patuhi KLH, Walikota Bandung Serukan Partisipasi Warga Dalam Penanganan Sampah



Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. (BN)

BANDUNG, BN – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, terkait pengolahan sampah Pemerintah Kota Bandung akan menindaklanjuti arahan Menteri Lingkungan Hidup dan semua kebijakan pengelolaan sampah akan didasarkan pada data resmi dan koridor hukum yang berlaku.

Farhan mencatat dan menghargai penegasan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq bahwa penggunaan insinerator mini tidak dibenarkan karena berpotensi menimbulkan emisi berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan.

"Pemkot Bandung mendukung penuh prinsip kehati-hatian dan kepuhan terhadap regulasi lingkungan nasional," katanya.

Untuk memberi gambaran yang jelas kepada masyarakat, secara umum mesin yang biasa disebut insinerator mini memiliki kapasitas relatif kecil, misalkan unit portabel dan rumah sakit yang berkisar puluhan kilogram per jam (contoh 10-50 kg/jam), hingga unit semi-industri atau kecil yang berkisar puluhan hingga beberapa ratus kilogram per jam (mis. 50-200 kg/jam atau 200-500 kg/jam), tergantung tipe dan produsennya.

Bupati Bogor Jalin Silaturahmi Dengan Paspampres



Bupati Bogor Rudy Susmanto (nomor 2 dari kanan). (eml)

JAKARTA, BN – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, terus memperkuat sinergi dan koordinasi lintas lembaga, salah satunya bersilaturahmi dengan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Republik Indonesia, Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha. Silaturahmi ini dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan di Kabupaten Bogor.

Silaturahmi berlangsung di Markas Komando (Mako) Paspampres RI, Jakarta, Jum'at pekan lalu. Hadir bersama Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara dan Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Letkol Inf. Henggar Tri Wahono.

Silaturahmi tersebut juga menjadi momentum strategis untuk mempererat hubungan antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Paspampres RI beserta jajaran, khususnya dalam mendukung pengamanan kegiatan kenegaraan yang kerap berlangsung di wilayah Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menjelaskan, bersama Ketua DPRD Kabupaten Bogor dan Dandim 0621 Kabupaten Bogor, kami bersilaturahmi dengan Komandan Paspampres RI, Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha.

"Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Paspampres beserta jajaran, guna menjaga keamanan serta kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor," jelas Rudy.

Melalui silaturahmi ini, diharapkan hubungan kelembagaan antara Pemkab Bogor dan Paspampres RI semakin solid, sehingga pelaksanaan tugas pengamanan negara dapat berjalan optimal dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Kabupaten Bogor. (eml)

Evaluasi Program MBG, Sekda Labuhanbatu Ajak Pengelola Dapur dan SPPG Perkuat Komitmen Pelayanan



Rapat Evaluasi Program MBG. (sukmo)

LABUHANBATU, BN – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu terus berupaya memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan baik dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Sebagai bentuk kepedulian dan pengawasan, Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Ir. Hasan Heri Rambe, selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) MBG, menggelar rapat evaluasi bersama para pengelola dapur dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Rapat yang berlangsung di Ruang Data dan Karya, Kompleks Kantor Bupati Labuhanbatu, pada Selasa (20/01) tersebut menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas berbagai kendala yang ditemui selama pelaksanaan program MBG di lapangan. Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, para Asisten Setdakab, Staf Ahli Bupati, kepala OPD terkait, Satgas MBG, Kepala SPPG, serta Ketua Yayasan Pengelola Dapur.

Dalam suasana diskusi yang terbuka dan konstruktif, Sekda Hasan Heri Rambe menegaskan bahwa evaluasi ini bukan semata mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan setiap tahapan program berjalan sesuai standar dan tetap mengutamakan kesehatan serta keselamatan para penerima manfaat.

"Program MBG ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak. Karena itu, kualitas, kebersihan, dan keamanan pangan harus menjadi perhatian utama kita bersama," ujarnya.

Ia menjelaskan, beberapa hal yang menjadi perhatian meliputi kelengkapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, izin kualitas air, hingga izin pengelolaan limbah. Menurutnya, kelengkapan administrasi tersebut bukan sekedar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga mutu layanan.

Hasan Heri Rambe juga menekankan pentingnya pengawasan yang berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa dapur yang terbukti melakukannya pelanggaran akan diberi sanksi secara bertahap dan proporsional, sembari tetap dibina agar mampu memenuhi standar yang ditetapkan. "Kami mendorong percepatan pengurusan sertifikasi, namun tetap harus sesuai prosedur. Tujuan akhirnya satu, agar masyarakat merasa aman dan terlindungi," tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Labuhanbatu, Prisia Dinanti, menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 12 dapur SPPG yang telah beroperasi dan melayani masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

Adapun yayasan pengelola dapur SPPG tersebut antara lain Yayasan Kumle Jaya Bermartabat, Yayasan Al Azhar Padang Lawas, Yayasan Darul Hasanah Bilah, Yayasan Merah Putih Sejati, Yayasan Widia Loka Lestari, Yayasan Tunas Muda Asahan, Yayasan Kemala Bhayangkari, Yayasan Jamsan Peduli Umat, serta Yayasan Kolaborasi Ridefa Kharsa yang tersebar di sejumlah kecamatan.

Melalui rapat evaluasi ini, para pengelola yayasan menyatakan komitmennya untuk terus berbenah, mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, serta memberikan pelayanan terbaik bagi para penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Labuhanbatu. (M.SUKMA)

Spesifikasi seperti ini biasanya ditemukan pada produk-produk insinerator yang dipasarkan untuk fasilitas kecil/menengah. "Pemahaman kapasitas ini penting agar kita membedakan antara perangkat kecil yang dilarang dan fasilitas besar yang memiliki proses kontrol emisi ketat," ucapnya.

Kondisi di Bandung: insinerator berkapasitas lebih besar

Beberapa insinerator yang saat ini dimiliki atau diupayakan di wilayah Bandung mampu mengolah sampah pada skala yang jauh di atas kategori "mini", contoh ada fasilitas yang terukur kapasitasnya hingga lebih dari 1 ton per hari atau setara beberapa ton per hari pada operasi penuh.

Namun, setiap rencana pemanfaatan teknologi pembakaran tersebut akan dikaji ketat agar memenuhi standar emisi, izin lingkungan, dan prinsip ramah lingkungan sebagaimana diamanatkan Kementerian LH. Pemkot Bandung tidak akan menggunakan perangkat yang termasuk kategori "insinerator mini" yang dilarang.

■ **Bersambung ke hal.11 kol.5**

BBWS Citanduy Perbaiki Tebing Sungai Ciseel Desa Kertahayu

CIAMIS, BN — Upaya penanganan longsor di bawah jembatan gantung penghubung Desa Kertahayu, Kabupaten Ciamis, terus dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy. Meski sempat terdampak bencana susulan akibat naiknya debit air Sungai Ciseel, proses perbaikan tetap dilanjutkan demi menjaga keselamatan warga di sekitar tebing sungai.

Melalui SDA Satker OP, BBWS Citanduy di bawah koordinasi PPK OP 3 bpk Ijang melakukan langkah cepat dengan pemasangan bronjong untuk menahan tebing yang longsor dan mengamankan tebing sungai ciseel. Penanganan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi alam yang dinamis di lokasi pekerjaan.

PPK OP 3 BBWS Citanduy, Bpk Ijang, menyampaikan bahwa naiknya debit air sempat memperlambat proses pekerjaan, namun tidak menghentikan upaya penanganan. "Saat debit air Sungai Ciseel naik, sempat terjadi bencana susulan yang berdampak pada area pekerjaan. Namun kami tetap melakukan perbaikan dan penguatan bronjong agar warga di sekitar tebing sungai tetap aman dan tidak terjadi kerusakan lebih parah," ujar bpk Ijang.

Pekerjaan pemasangan bronjong tersebut dilaksanakan oleh pengusaha muda asal Ciporoan, Ian Widianto



Tebing Sungai Ciseel Desa Kertahayu sedang diperbaiki. (asep)

pihak BBWS Citanduy.

"Memang sempat terjadi bencana susulan ketika debit air naik, namun alhamdulillah pihak BBWS Citanduy dan kontraktor tetap sigap melakukan perbaikan. Kami dari BPD Kertahayu bersama warga ikut mengawasi dari awal pekerjaan langsung di lapangan," kata Pa Endun.

Ia menegaskan bahwa tersebut yang berlokasi di dusun Tamansari RT 12 RW 04 sangat penting bagi masyarakat. "Kami berharap dengan penanganan yang dilakukan sekarang, pemukiman warga bisa lebih aman dari bencana longsor tebing sungai meskipun debit air kembali naik," tambahnya.

Masyarakat setempat pun menyampaikan harapan agar penanganan infrastruktur di kawasan rawan bencana terus dilakukan secara berkelanjutan. Respons cepat BBWS Citanduy dinilai mampu meminimalisir dampak bencana serta menjaga keamanan masyarakat kertahayu Ciamis. (ASEP SUJANA)

Kasatgas Pimpin Rakor Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera Utara

ASAHLAN, BN- Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana banjir dan longsor sebagai forum strategis untuk menyalurkan kebijakan, pendanaan, dan pelaksanaan pemulihan pascabencana. Rapat ini menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan guna memastikan pemulihan berjalan cepat, terarah, dan berkelanjutan, terutama pada pemulihan layanan dasar serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.

Rapat koordinasi dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Prof. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana



Rakor Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera Utara

Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, B.Sc., unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, pimpinan kementerian dan lembaga terkait, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara sebagai bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp430 miliar untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

percepatan pemulihan pascabencana melalui pengaturan koordinasi daerah, penyediaan dan pemutakhiran data, serta pelaksanaan kebijakan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten agar program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap melakukan pendampingan kepada daerah meskipun status tanggap darurat telah dicabut. Pendampingan tersebut mencakup penyediaan hunian tetap, bantuan logistik, serta bantuan sosial bagi masyarakat terdampak. Rapat koordinasi ini juga dimanfaatkan sebagai forum diskusi dan tanya jawab untuk mengidentifikasi kendala di lapangan serta merumuskan langkah percepatan pemulihan di daerah yang masih memerlukan penanganan lanjut.

(T.P)

KPK Ciduk ...

menyebutkan, 9 dari 15 orang yang ditangkap itu, termasuk Madi, segera dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Budi mengungkapkan, OTT ini berkaitan dengan dugaan korupsi dengan modus uang jatah atau fee proyek dan dana corporate social responsibility (CSR) di wilayah Kota Madiun. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap dalam OTT ini.

Profil Wali Kota Madiun Madi. Ia terpilih sebagai Wali Kota Madiun setelah

memenangi Pilkada Madiun pada November 2024. Madi yang berpasangan dengan Bagus F Panuntun meraih 56 persen suara, mengalahkan dua pasangan calon lainnya, Bonie Laksmana-Bagus Rizki dan Indra Rayaldi. Dalam pilkada serentak 2024, pasangan Madi-Panuntun didukung 11 partai politik, yaitu PSI, Nasdem, Partai Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, PAN, Prima, Gelora, PBB, dan PPP.

Sebelum terjun ke dunia politik, Madi adalah seorang guru geografi di SMAN 1 Kota Madiun pada

tahun 1989 hingga awal 2000-an. Kemudian, ia menjabat sebagai Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Madiun dan terus menanjak dalam kariernya. Pada tahun yang sama, Madi ditunjuk sebagai Kepala Tata Usaha Dinas Pendidikan, dan setahun kemudian menjadi Penjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun.

Madi melanjutkan kariernya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Daerah pada tahun 2005, dan setahun setelahnya kembali ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun. Madi kembali maju sebagai calon wali kota Madiun dalam pilkada serentak 2024, dan berpasangan dengan pengusaha muda Bagus Panuntun.

(sumber kompas.com/red)

Sambungan hal 1

dayaan Kota Madiun. Berkat prestasinya yang gemilang, pada tahun 2009 ia dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kota Madiun.

Setelah sembilan tahun menjabat, Madi mencoba peruntungan dalam politik dengan maju pada pilkada 2018, di mana ia berhasil menang bersama Indra Raya. Lima tahun kemudian, Madi kembali maju sebagai calon wali kota Madiun dalam pilkada serentak 2024, dan berpasangan dengan pengusaha muda Bagus Panuntun.

(sumber kompas.com/red)

Sambungan hal 10

dengan regulasi pusat dan sekaligus mencari alternatif pengelolaan dalam kota yang aman dan efektif. Langkah yang kami ambil (sejalan dengan arahan KLH).

Segala rencana atau perangkat pengolahan sampah yang termasuk kategori insinerator mini akan dihentikan dan tidak dioperasikan. "Kami akan berkonsultasi dan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian LH untuk langkah teknis yang memenuhi standar. Percepatan pengolahan di sumber: Memperkuat program 3R (Reduce, Reuse, Recycle), menggenjot komposting komunitas, pemanfaatan maggot, bank sampah, dan TPST-berbasis RW agar volume yang mesti dibuang ke TPA berkurang," paparnya.

(Zaen)

Perkuat Sinergi Organisasi Perempuan, DPD Wanita Pujakesuma Asahan Dilantik



Pelantikan DPD Wanita Pujakesuma Kabupaten Asahan masa bakti 2026-2030

ASAHLAN, BN- Pelantikan DPD Wanita Pujakesuma Kabupaten Asahan masa bakti 2026-2030 menjadi momentum penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Asahan dan organisasi kemasyarakatan perempuan dalam mendukung agenda pembangunan daerah. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan Ny. Yusnila Indriati Taufik, jajaran OPD, Camat se-Kabupaten Asahan, serta pengurus Wanita Pujakesuma tingkat provinsi, sebagai bentuk dukungan lintas sektor terhadap peran strategis organisasi perempuan.

Ketua DPD Wanita Pujakesuma Kabupaten Asahan terpilih, Siti Afsah Suprianto, menyampaikan bahwa kepengurusan periode 2026-2030 diarahkan untuk mendorong peran aktif perempuan dalam penguatan keluarga, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan pelestarian budaya. Ia menegaskan pentingnya kerja kolaborasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan agar program organisasi dapat berjalan berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketua DPW Wanita Pujakesuma Provinsi Sumatera Utara, HJ Chairiah Sujono Giatmo, SE, mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Asahan dan kehadiran seluruh pihak terkait. Menurutnya, keterlibatan aktif pemerintah daerah dan unsur organisasi menjadi modal penting dalam memperkuat peran Wanita Pujakesuma sebagai bagian dari kekuatan sosial dan budaya di daerah.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.AP., yang juga selaku Ketua DPD Pujakesuma Kabupaten Asahan, dalam sambutannya menegaskan bahwa Wanita Pujakesuma memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga, menjaga nilai budaya, serta mendorong partisipasi sosial perempuan. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan terbuka untuk bersinergi dan mendukung program-program Wanita Pujakesuma yang sejalan dengan arah pembangunan daerah, khususnya pada bidang pemberdayaan perempuan, ekonomi kerakyatan, pendidikan keluarga, dan pelestarian nilai budaya lokal. (T.P)

Oknum Guru ...

Sambungan hal 7

Selanjutnya, Nissa menyatakan 1 oknum laki laki inisial S dan 1 Oknum perempuan inisial S, dan diduga kepala sekolah turut terlibat karena melakukan pembiaran di lingkungan sekolah.

"Ya, kita sudah melaporkan bullying tersebut ke Polres Labuhanbatu, Insial S perempuan, inisial Slaki laki dan Kepala sekolahnya yang kita duga melakukan pembiaran di sekolah tersebut," ucap Nissa Dalimunthe.

Selanjutnya, Nissa Dalimunthe meminta atensi Dinas Pendidikan Sumatera Utara untuk evaluasi sekolah serta beberapa oknum guru tersebut, "Kita meminta dinas pendidikan Sumatera Utara untuk evaluasi sekolah tersebut serta oknum guru yang melakukan pembullyan, serta memecat oknum guru tersebut," tutup Nissa Dalimunthe. Sementara pihak SMA Negeri 1 Aek Kuo, belum berhasil dikonfirmasi BN. (m.sukma)

Bupati Bogor Gandeng ...

Sambungan hal 12

Bogor menyampaikan komitmennya untuk lebih serius meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan pada tahun 2026," katanya.

Ia melanjutkan, selain tata kelola pemerintahan, KPK bersama Pemkab Bogor juga membahas sektor strategis yang saat ini menjadi perhatian utama, yakni tata kelola pertambangan. KPK menilai permasalahan di sektor pertambangan perlu ditangani secara kolaboratif karena melibatkan banyak kewenangan lintas instansi.

"KPK akan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, Kejaksaan, Kepolisian, Pemerintah Provinsi, serta pihak terkait lainnya untuk memperbaiki tata kelola pertambangan," ujarnya.

Menurutnya, apabila aktivitas pertambangan tetap berjalan, manfaat ekonominya, khususnya dari sektor pajak dan pendapatan daerah, harus benar-benar diperhitungkan. Di sisi lain, dampak lingkungan juga harus diminimalisir karena berpotensi menimbulkan beban anggaran pemulihan di kemudian hari.

Ia menambahkan, KPK akan memfasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan, melakukan analisis dan identifikasi permasalahan, serta merumuskan langkah tindak lanjut bersama. KPK juga akan melakukan pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung, guna memastikan perbaikan tata kelola berjalan optimal. (eml)

Dua Perda ...

Sambungan hal 12

kapasitas sumber daya manusia serta kerentanan terhadap perubahan iklim dan harga.

Tak hanya itu fungsi kelembagaan pembudi daya ikan dan petambak garam selama ini dikatakan Gubernur Khofifah belum berjalan optimal. Sehingga dengan adanya Perda ini diharapkan permasalahan yang ada bisa tertangani secara kolaboratif dan sinergis bersama para pemangku kepentingan seiring dengan berlakunya Perda. "Perda diharapkan menjadi solusi secara regulasi sekaligus payung hukum terhadap penyelesaian permasalahan dan kendala yang dialami oleh pembudi daya ikan dan petambak garam," tuturnya.

"Termasuk kolaborasi sebagai upaya optimalisasi penyelegaraan perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan dan petambak garam," imbuhnya.

Selain itu, Provinsi Jawa Timur menjadi daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap produksi perikanan budi daya dan produksi garam di Indonesia, sehingga pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan harus mampu meningkatkan kesejahteraan pembudi daya ikan dan petambak garam.

Jatim tercatat sebagai provinsi dengan produksi garam tertinggi nasional dengan total 329.102,14 ton sepanjang tahun 2025. Selain itu Produksi Perikanan Tangkap Jawa Timur tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional dengan produksi 607.344,30 Ton sepanjang tahun 2025. Begitu juga produksi perikanan budi daya Jatim tercatat tertinggi ketiga nasional dengan total produksi 1.441.559,31 Ton di tahun 2025.

Hal ini turut didukung dengan angka ekspor komoditas perikanan Jatim sepanjang tahun 2025 tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional dengan angka 356.476,67 Ton. "Perda ini mendukung percepatan pembangunan garam nasional pada sentra ekonomi garam rakyat di Provinsi Jawa Timur dan diharapkan bisa mendorong produksi perikanan kota agar terus meningkat," ungkapnya.

Berikutnya Gubernur Khofifah juga menyampaikan pandangan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur. Perda ini adalah inisiatif Pemprov Jawa Timur, di mana pembahasannya diawali pada saat penyampaian Nota Penjelasan Gubernur Jawa Timur pada Rapat Paripurna tanggal 6 Oktober 2025.

Disampaikan Khofifah, Perda diperlukan sebagai dasar hukum penyelegaraan penanggulangan bencana mengingat materi muatan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan hukum dalam penyelegaraan penanggulangan bencana di Jawa Timur. "Perubahan terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2010 agar penyelegaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara optimal dan terintegrasi," ujarnya. (dji)

Patuhi KLH ...

"Mengapa ini penting bagi warga Bandung, kendala yang sedang kami hadapi Kota Bandung saat ini menghadapi kesenjangan antara timbulan sampah harian dan kapasitas pembuangan/olah (misalnya pembatasan kuota pembuangan ke TPA Sarimukti yang mengurangi jatah pembuangan daerah), sehingga ada potensi penumpukan pada beberapa titik. Mohon dimengerti bahwa larangan terhadap insinerator mini dari Kementerian membuat opsi pembakaran skala kecil yang pernah diperlakukan menjadi tidak mungkin dilanjutkan, namun hal ini kami terima sebagai bagian dari prioritas perlindungan lingkungan," jelas Farhan.

Oleh karena itu, lanjutnya, solusi kami harus selaras

OTT BUPATI PATI, KPK SITA UANG RP 2,6 MILLIAR

□ KPK Resmi Nyatakan Bupati Sudewo Tersangka Korupsi



Bupati Pati Sudewo

JAKARTA, BN - KPK menemukan uang tunai Rp 2,6 miliar saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pati Sudewo. "Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim

juga mengamankan sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai miliaran rupiah," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (20/1/2026).

Budi mengatakan Sudewo diduga terlibat jual beli jabatan. Pengisian jabatan tersebut berada di lingkup desa. "Terkait pengisian jabatan Kaur, Kasie, ataupun Sekdes (sekretaris desa)," kata Budi.

Budi menyebut Sudewo diduga mematok harga un-

tuk jabatan tertentu. Dia mengatakan harga untuk tiap jabatan berbeda-beda. "Ada (patokan harga). Jadi memang ada jumlah tertentu yang dipatok untuk mengisi suatu jabatan di lingkup pemerintah desa," kata Budi.

Sebelumnya, OTT di Pati, Jawa Tengah, dilakukan pada Senin (19/1). Sudewo sudah menjalani pemeriksaan di Polres Kudus. Dia kemudian dibawa ke Gedung KPK di Jakarta hari ini.

Budi mengatakan OTT terhadap Sudewo dilakukan

terkait dugaan jual beli jabatan di pemerintahan desa. KPK menduga Sudewo memasang harga untuk jabatan tertentu. "Jadi, memang ada jumlah tertentu yang dipatok untuk mengisi suatu jabatan di lingkup pemerintah desa," kata Budi.

Budi mengatakan salah satu barang bukti yang disita adalah uang miliaran rupiah. Dia belum menjelaskan dari siapa uang itu berasal. "Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim juga mengamankan sejumlah uang

dalam bentuk rupiah, senilai miliaran rupiah, nanti kami akan sampaiakan," ujarnya.

Sudewo bersama tujuh pihak yang terjerat OTT

sudah tiba di Gedung KPK, Jakarta, Selasa pagi. KPK resmi menetapkan Bupati Pati Sudewo bersama 3 tersangka lainnya serta mengamankan barang bukti se-



(*red)

REHAB ALUN-ALUN LUMAJANG Rp 3,6 M MENGECEWAKAN

□ DLH Tutup Mulut, PPK Enggan Dikonfirmasi



Tim investigasi Media Bidik Nasional cetak dan online, pada hari Jum'at, (19/12/2025) mendatangi kantor Kadis Dra. Hertutik, M.Si. dan Sekdin Agus Rokhman Rozaq. (Son)

LUMAJANG, BN - Rehabilitasi alun-alun Lumajang, anggaran yang sangat fantastis senilai Rp. 3.606.961.500,- bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, dikerjakan kontraktor pelaksana CV. Guna Bakti, dinilai oleh masyarakat mengecewakan tak sesuai harapan.

MENURUT sumber BN, domisili di sekitar alun-alun sangat menyayangkan

proyek miliaran tersebut diduga dikerjakan asal jadi. Dalam hitungan hari saja sudah banyak yang rusak dan tidak sesuai dengan standart kualitas dari nilai proyek tersebut.

Diduga proyek tersebut banyak dikorupsi hanya untuk memperkaya diri sendiri, bahkan pekerjaan tersebut sangat kasar, papan nama proyek pun sudah tidak ada pada tempatnya cepat-cepat diambil. Diduga kontraktor bekerja tidak profesional, akibatnya ada indikasi merugikan keuangan pemerintah daerah, karena diduga pekerjaan tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya).

Dengan dasar temuan tersebut tim investigasi media BN, pada hari Jum'at (19/12/2025) jam 13.00

WIB, mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup Lumajang, namun Kadis DLH Dra. Hertutik, M.Si. dan Sekdin Agus Rokhman Rozaq tidak berada di tempat sedang rapat di kantor Pemkab.

Tim investigasi BN Senin (22/12/25) jam 11.30 WIB mendatangi kembali kantor Dinas Lingkungan Hidup Lumajang untuk kedua kalinya, Kadis DLH Dra. Hertutik, M.Si. dan Sekdin Agus Rokhman Rozaq, juga tidak ada di tempat sedang rapat di Pemkab.

Bahkan Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak mau dikonfirmasi terkait rehabilitasi Alun-alun. Kata Kabid yang bisa memberikan keterangan harus Kadis DLH dan Sekdin. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari Kadis DLH.

dari Kadis DLH.

Ketua Laskar Merah Putih Kab. Lumajang Muhammad Nurul Huda mengamati dan mendengarkan keluhan warga Lumajang terkait rehabilitasi alun-alun, menyoroti kasus ini kuat dugaan ada permainan proyek/anggaran, apalagi proyek tersebut papan namanya cepat-cepat diam-bil dan pekerjaan proyek tidak sesuai juga banyak yang rusak.

Dikatakan Huda temuan ini harus ditindaklanjuti jika ada dugaan indikasi penyimpangan, maka pihak berwenang/APH harus mengambil langkah hukum, masyarakat berhak tahu bagaimana anggaran tersebut dikelola, untuk informasi tersebut harus diawasi terus menerus secara ketat untuk memastikan



Pekerjaan CV. Guna Bakti, banyak yang rusak dan terlihat acak-acakan.

kualitas pekerjaan sesuai dengan standart yang ditetapkan, "Ini menjadi pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran tersebut, langkah te-gas diharap mampu menjawab keresahan masyarakat," tegas ketua LMP Huda. (SON/Bersambung Edisi Berikutnya)

Bupati Gandeng KPK Dampingi Pemkab Bogor Jalankan Sejumlah Program Strategis

BOGOR, BN - Bupati Bogor, Rudy Susmanto menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam menjalankan sejumlah program strategis daerah. Hal ini demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik KKN.

Hal tersebut diungkapkan Rudy Susmanto usai kegiatan Koordinasi Evaluasi Program Tahun 2025 dan Pembahasan Rencana Kerja dan Program Prioritas Tahun 2026 serta Pembahasan Alih Fungsi Lahan dan Pertambangan di Kabupaten Bogor, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Selasa (20/1/2026).

Hadir Direktur Koordinasi Dan Supervisi (Korsup)

Wilayah II KPK RI, Kepala Satgas Koordinasi Dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK RI, PIC KPK Wilayah Jawa Barat, dan jajaran tim KPK RI. Acara diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, para asisten dan staf ahli, Inspektor, jajaran kepala perangkat daerah, direktur RSUD, pimpinan BUMD, serta para Camat.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan, langkah ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Bogor dalam membuka lembar baru tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Pemkab Bogor secara resmi meminta pendampingan KPK terhadap beberapa program strategis. Ini adalah bagian dari evaluasi satu tahun perjalanan pemerintahan kami, sekaligus respons atas berbagai aduan masyarakat dan pemberitaan yang berkembang," ujar Rudy.



Bupati Bogor Rudy Susmanto (tengah). (eml)

Menurut Rudy, pendampingan KPK diperlukan agar setiap kebijakan dan program strategis yang dijalankan pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Salah satu fokus utama pembahasan adalah persoalan pertambangan dan alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor. Pembahasan terkait sektor pertambangan dijadwalkan berlangsung selama dua hari, mulai hari ini hingga esok hari," kata Rudy.

Rudy menjelaskan, selain sektor pertambangan, Pemkab Bogor juga meminta pendampingan KPK terhadap sejumlah proyek strategis, diantaranya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan khusus angkutan tambang dan barang, pembangunan Jalan Rancabungur-Leuwiliang, serta beberapa program strategis lainnya yang akan dikaji lebih lanjut.

"Pendampingan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga dilakukan melalui kolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Polres Bogor," jelas Rudy.

Bupati Rudy menegaskan, ini adalah wujud komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menghadirkan pemerintahan yang sehat dan transparan. Kami ingin memastikan seluruh langkah pembangunan dikawal secara terbuka dan akuntabel.

Direktur Koordinasi Dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK RI, Bahtiar Ujang Purnama mengungkapkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi peningkatan pengelolaan integritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang pada tahun 2025 mencapai skor 73,8. Peningkatan tersebut dinilai sebagai hasil perbaikan tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Bogor, Rudy Susmanto.

"Pada pertemuan hari ini kami melakukan evaluasi tata kelola pemerintahan tahun 2025. Salah satu capaian positifnya adalah skor pengelolaan integritas Kabupaten Bogor yang meningkat menjadi 73,8," ujarnya.

Bahtiar mengatakan, KPK juga menyoroti delapan area tata kelola pemerintahan. Pada tahun ini, sejumlah pemerintah daerah di Indonesia diketahui mengalami penurunan kinerja di beberapa area, terutama pada pengadaan barang dan jasa, perencanaan, serta penganggaran.

"KPK mencatat adanya komitmen kuat dari Bupati Bogor untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Dalam forum supervisi, Bupati

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

Dua Perda Strategis Disahkan Gubernur dan Pimpinan DPRD Jatim

SURABAYA, BN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Pimpinan DPRD Jatim resmi mengesahkan dua Peraturan Daerah (Perda) strategis dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (19/1).

Kedua Perda yang dimaksud yakni Perda Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam serta Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur.

Setelah dilakukan penyampaian pendapat akhir, Gubernur Khofifah bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRD

Jatim melakukan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama dua Perda yang telah disepakati 9 fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur.

Disampaikan Khofifah, untuk Perda tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam digodok untuk melindungi dan memperjuangkan pemberdayaan pembudi daya ikan dan petambak garam di Jatim.

Sejauh ini dikatakan Khofifah memang ada sejumlah permasalahan dan kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kualitas dan mutu produk, rendahnya

■ Bersambung ke hal.11 kol.5



Gubernur Khofifah saat menandatangani dua perda yang disahkan (foto: istimewa/BN)